



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 /PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2038 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan nonfisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, *uprating* dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM adalah dokumen rencana jangka panjang (15 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. dokumen kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM di dalam satu daerah administrasi;
 - b. menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam Penyelenggaraan SPAM Daerah;
 - c. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSDP-SPAM; dan
- b. Mekanisme pelaksanaan KSDP-SPAM.

BAB III KSDP-SPAM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan KSDP-SPAM.
- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 5

KSDP-SPAM disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. rencana strategis Daerah;
- c. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- d. RTRW; dan
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 6

- (1) Sistematika KSDP-SPAM terdiri atas:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan SPAM;

Bab III Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan SPAM;

Bab IV Kondisi Capaian Pelayanan Sektor Air Minum;

Bab V Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;

Bab VI Rencana Aksi Percepatan Investasi Bidang SPAM; dan

Bab VII Penutup.

- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 7

- (1) KSDP-SPAM disusun dan dilaksanakan oleh PD yang memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan SPAM.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan skenario penyelenggaraan SPAM yang telah disusun, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja sama dengan PD terkait lainnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan layanan;
 - b. kelembagaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.

- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2024

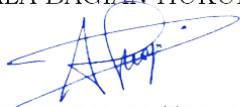
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

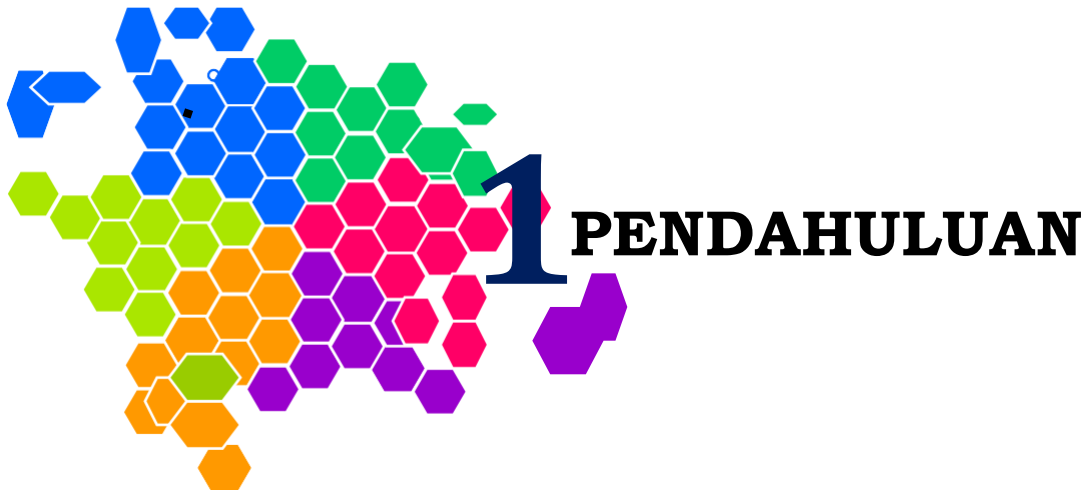
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2024-2029



1.1 LATAR BELAKANG

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini belum semua masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Jumlah terbesar penduduk yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah masyarakat yang bermukim diperdesaan dan pinggiran kota. Masyarakat tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan lingkungan permukiman yang kurang sehat. Kelayakan air minum harus memenuhi kelayakan secara kualitas maupun kuantitas.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* meliputi: a. komitmen Nasional dan Global pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; b. pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan c. pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk

menyejahterakan masyarakat. Salah Satu dari 17 (tujuh belas) Tujuan TPB/SDGs adalah Air Bersih dan Sanitasi yang Layak. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun hingga saat ini belum semua masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Jumlah terbesar penduduk yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah masyarakat yang bermukim diperdesaan dan pinggiran kota. Masyarakat tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan lingkungan permukiman yang kurang sehat. Kelayakan air minum harus memenuhi kelayakan secara kualitas maupun kuantitas.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan pencapaian target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (WWS-MDG), Indonesia perlu meningkatkan agar akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu capaian akses air minum layak sebesar 70% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%.

Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secara nasional, pemerintah pusat menyediakan perangkat kebijakan dan arahan serta program kepada daerah dalam upaya mendorong percepatan capaian pelayanan air minum masing-masing daerah.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka upaya pencapaian target Air minum kabupaten/kota diharuskan menyusun Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Kebijakan dalam upaya percepatan layanan air minum dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pengembangan air minum. Keberadaan KSDP-SPAM merupakan arah pengembangan Sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada).

Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum kabupaten Banjar mutlak harus diprioritaskan. maka pemerintah kabupaten Banjar harus menyusun strategi, program, dan Kebijakan untuk penyediaan 100% akses air minum kabupaten Banjar.

Untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan mandatnya dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi skala kabupaten/kota menuju 100% akses, pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas,

terukur, dan dapat dilaksanakan / implementatif. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Dalam laporan ini, kebijakan daerah tersebut dinamakan dengan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM.

Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM bahwa Kabupaten/Kota menyusun Jakstra SPAM dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”** melalui misi 2 terwujudnya ekonomi yang berbasis kerakatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas dengan sasaran berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten, pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini bertujuan untuk :

1. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM dan upaya pencapaian sasaran pengembangan SPAM yang ada di daerah;
2. menyusun skenario pengembangan dan penyelenggaraan SPAM;
3. merumuskan rencana investasi bidang air minum.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan ini adalah:

1. teridentifikasinya permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM dan upaya pencapaian sasaran pengembangan SPAM yang ada di Daerah;
2. tersusunnya skenario pengembangan dan penyelenggaraan SPAM;
3. Terumuskannya Rencana Investasi Bidang Air Minum.

1.3 LANDASAN HUKUM

1.3.1 Undang – undang

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3.2 Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

1.3.3 Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3.4 Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran Peraturan Menteri tersebut.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

1.3.5 Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7 Tahun 1995 tentang Program kali Bersih;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 337 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang,

Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum;

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

1.3.6 Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Pengertian

a. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan

stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

b. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

c. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha

d. Sustainable Development Goals (SDG's)

Dengan berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) telah dirumuskan kembali agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak miskin: Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan di semua tempat.
2. *Zero Hunger*: Mengakhiri kelaparan untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan untuk semua orang pada setiap usia.
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan akses universal untuk pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan pendidikan seumur hidup untuk semua orang.
5. Kesetaraan *Gender*: Mencapai kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi.
6. Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi bagi semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses terhadap energi yang bersih, terjangkau, dan dapat diandalkan bagi semua orang.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan layak dan produktif bagi semua orang.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Mendorong pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.
10. Pengurangan Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan regional serta

mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi.

11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membuat kota serta permukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Mengelola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan.
13. Tindakan terhadap Perubahan Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan ekosistem pesisir untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat: Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk penghijauan dan perlindungan ekosistem darat.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Memastikan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta mengurangi kekeerasan, korupsi, dan tindak kejahatan lainnya.
17. Kemitraan untuk Tujuan: Meningkatkan kemitraan global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

e. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

1. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

g. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

1. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
2. Hasil kajian kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; serta
3. Kajian sumber pembiayaan.

h. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.4.2 Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan (KDSP) sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Banjar berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan air minum Kabupaten Banjar berikut kebijakan dan strategi-strategi pencapaiannya. Adapun ruang lingkup KDSP SPAM Kabupaten Banjar meliputi :

1. Tujuan dan sasaran pengembangan;
2. Dasar kebijakan;
3. Pendekatan penanganan;

4. Prioritas pengembangan;
5. Konsepsi kebijakan operasional; dan
6. Rencana strategis dan program pengembangan SPAM.

1.5 METODE PENYUSUNAN

1.5.1 Persiapan

1. Identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat ini;
2. Identifikasi target nasional dalam pengembangan SPAM;
3. Identifikasi dan analisis produk kebijakan yang telah ada, termasuk produk perencanaan jangka menengah;
4. Identifikasi peraturan perundang-undangan (aspek legal) terkait;
5. Identifikasi dan analisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan SPAM, termasuk tugas dan fungsinya;
6. Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis, penyusunan dan pengambilan keputusan selama proses penyusunan KSDP- SPAM.

1.5.2 Perumusan Visi dan Misi

1. Visi dari Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM pada dasarnya merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;
2. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang di daerah yang bersangkutan.
3. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
4. Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami;
5. Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi

dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;

6. Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi Daerah.

1.5.3 Identifikasi dan Analisis Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan

1. Langkah ini merupakan langkah bagi Tim atau SKPD penyusun KSDP-SPAM untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu, permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang sekiranya akan dihadapi dalam rangka implementasi KSDP-SPAM nantinya;
2. Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi, baik pada lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi;
3. Inti dari langkah ini adalah untuk menemukan isu strategis, akar permasalahan, dan tantangan yang sekiranya dihadapi dalam melaksanakan pengembangan SPAM di daerah yang bersangkutan.

1.5.4 Perumusan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan adalah suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaitannya dengan isu dan persoalan (permasalahan) yang diidentifikasi terhadap pencapaian hasil kebijakan dan keputusan yang ditentukan.
2. Sasaran adalah suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai. Merupakan spesifikasi dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif.
3. Dari pengertian tersebut, perumusan sasaran diharapkan dapat menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.
4. Dalam penentuan Tujuan dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi, serta berlaku pada periode Jasktra Pengembangan SPAM (periode 5 tahun/jangka menengah).
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai paling kurang pada periode Jasktra Pengembangan SPAM.
- c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana Jakstra Pengembangan SPAM.
- d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka merealisasikan misi



Gambar 1.1 Metode Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Air Minum (JAKSTRADA SPAM)

- 1. Secara umum kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.
- 2. Dengan demikian kebijakan dan strategi akan memuat langkah-langkah berupa penetapan program-program

indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak tersebut, yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pengembangan SPAM daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Air Minum (JAKSTRADA SPAM) ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Banjar, maksud dan tujuan, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan JAKSTRADA SPAM, serta sistematika penulisannya.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi mengenai visi misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan SPAM.

BAB 3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar, permasalahan yang di hadapi serta tantangan – tantangan yang menghadang upaya kemajuan SPAM Kabupaten Banjar.

BAB 4 KONDISI CAPAIAN PELAYANAN SEKTOR AIR MINUM

Bab ini berisi tentang angka capaian eksisting dari cakupan pelayanan di sektor air minum Kabupaten Banjar.

BAB 5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Bab ini berisi mengenai rumusan kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung kemajuan pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar.

BAB 6 RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG SPAM

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah tindak lanjut dari strategi yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

BAB 7 PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang Matriks Indikator, Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI PENGEMBANGAN SPAM

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang di sampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita – cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai (*desired future*) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang di emban. Berikut adalah Visi Kabupaten Banjar:

“ Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis ”

Sedangkan Visi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar merupakan pandangan / impian, cita-cita, nilai, masa depan pembangunan dalam upaya pengembangan sektoral khususnya di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Berikut adalah Visi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar :

**“ Terwujudnya Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar
yang Maju, layak, Aman dan Berkelanjutan ”**

2.2 MISI PENGEMBANGAN SPAM

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Bila Visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Tentunya pembuatan misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa misi adalah metode dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi.

Misi Penyediaan SPAM Kabupaten Banjar:

1. pengelolaan dan perlindungan sumber air baku untuk kebutuhan air minum masyarakat;
2. meningkatkan cakupan Pelayanan air minum yang layak dan aman melalui peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
4. meningkatkan kolaborasi dan partisipasi antar stakeholder dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar;
5. menyiapkan perangkat peraturan perundangan-undangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM;
6. menerapkan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar.

2.3 TUJUAN PENGEMBANGAN SPAM

Tujuan pengembangan SPAM Kabupaten Banjar:

1. meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumber air baku untuk kebutuhan air minum masyarakat;

2. tercapainya cakupan pelayanan air minum yang layak dan aman melalui peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
3. terwujudnya kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
4. terwujudnya kolaborasi dan partisipasi antar *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar;
5. tersedianya perangkat peraturan perundangan-undangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM;
6. terwujudnya inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar.

2.4 SASARAN PENGEMBANGAN SPAM

Sasaran pengembangan SPAM Kabupaten Banjar:

1. peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber air baku untuk kebutuhan air minum masyarakat;
2. peningkatan cakupan pelayanan air minum yang layak dan aman melalui peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
3. peningkatan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
4. mewujudkan kolaborasi dan partisipasi antar *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar;
5. mewujudkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM; dan
6. mewujudkan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar.



ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

3.1 PROFIL KABUPATEN BANJAR

3.1.1 ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak pada 2° 49' 55" - 3° 43' 38" pada garis Lintang Selatan dan 114° 30' 20" hingga 115° 33' 37" pada Bujur Timur.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru.

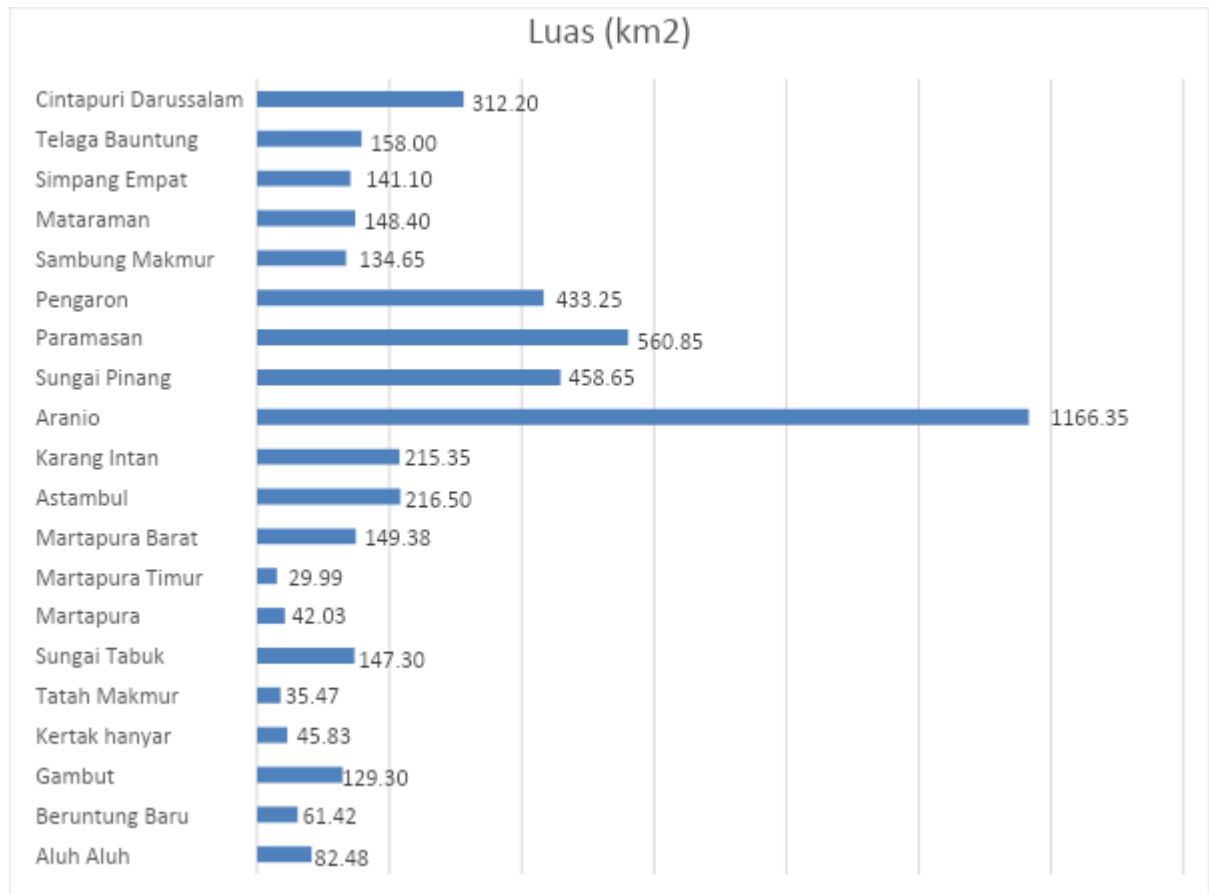
Luas Wilayah Kabupaten Banjar seluas $\pm 4.589 \text{ km}^2$. Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 (dua puluh) wilayah Kecamatan, 277 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan dengan kecamatan terluas adalah

Kecamatan Aranio, yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang terkecil adalah Kecamatan Martapura Timur yaitu 29,99 Km² (0,64 %).

Tabel 3.1.
Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km²)
1	BERUNTUNG BARU	61,42
2	KARANG INTAN	215,35
3	MARTAPURA	42,03
4	TATAH MAKMUR	35,47
5	ALUH ALUH	82,48
6	GAMBUT	129,30
7	ARANIO	1166,35
8	MARTAPURA TIMUR	29,99
9	KERTAK HANYAR	45,83
10	ASTAMBUL	216,50
11	MARTAPURA BARAT	149,38
12	MATARAMAN	148,40
13	SUNGAI TABUK	147,30
14	PENGARON	433,25
15	SAMBUNG MAKMUR	134,65
16	SIMPANG EMPAT	141,10
17	SUNGAI PINANG	458,65
18	TELAGA BAUNTUNG	158,00
19	CINTAPURI DARUSSALAM	312,20
20	PARAMASAN	560,85
Total		4.668,50

Sumber: BPS – KDA 2023



Grafik 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Banjar

3.1.2 KONDISI FISIK DASAR

Fisik dasar yang terdiri dari batas administrasi dan letak geografis, topografi dan kemiringan, suhu dan iklim, ketinggian dan kelerengan, geologis dan jenis tanah, kedalaman efektif tanah, erosi tanah dan sumber air.

3.1.2.1 Kondisi Topografi Dan Kemiringan

Kondisi topografi wilayah merupakan keadaan morfologi dan kemiringan lereng sangat penting untuk diketahui karena penataan ruang juga tergantung pada kondisi topografi suatu wilayah. Demikian juga pengembangan sarana dan prasarana sangat dipengaruhi kondisi kemiringan lereng lahan. Apabila ditinjau berdasar kondisi topografi lahannya, maka Kabupaten Banjar berada pada daerah dengan ketinggian yang berkisar antara 0 - 1.878 meter dari permukaan laut (m dpl). Ketinggian tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan letak dan jenis kegiatan

yang dikembangkan oleh penduduk sehingga ketinggian juga dipakai sebagai penentuan zonasi pemanfaatan ruang. Secara rinci pembangian wilayah Kabupaten Banjar terkait ketinggian wilayahnya, meliputi 35% berada di ketinggian 0–7 mdpl, 55,54% terdapat pada ketinggian 50 – 300 mdpl dan sisanya yaitu sebanyak 9,45% berada pada ketinggian lebih dari 300 mdpl. Selengkapnyadapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Kondisi Ketinggian Wilayah Kabupaten Banjar

KETINGGIAN WILAYAH (m dpl)	LUAS WILAYAH (Ha)	PROPORSI (%)
0 – 7	133.818,95	29,23
8 – 25	26.175,61	6,00
26 – 100	70.674,14	15,44
101 – 250	174.898,91	38,20
251 – 500	36.733,50	8,00
> 500	15.563,89	3,13

Rendahnya ketinggian sebagian wilayah Kabupaten Banjar dari permukaan air laut tersebut diperkirakan menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar sehingga sebagian wilayah Banjar selalu tergenang oleh air permukaan (29,93%) serta sebagian wilayah lagi tergenang secara periodik (0,58%).

Kemudian apabila dilihat berdasar aspek kemiringan lereng, maka kondisi wilayah Kabupaten Banjar cukup bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat bentukan morfologi wilayah Kabupaten Banjar yang meliputi dataran landai, daerah yang bergelombang, berbukit, serta pegunungan. Berdasar kondisi morfologi tersebut, maka kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Banjar dikategorikan dalam 5 (lima) kelas kemiringan, yaitu:

- a. 0-2%, kelas kemiringan ini pada umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang landai dengan nilai kemampuan lahan yang baik;
- b. 2-8%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang bergelombang hingga berbukit dengan nilai kemampuan lahan yang cukup baik;
- c. 8-15%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang bergelombang hingga berbukit dengan nilai kemampuan lahan yang cukup baik;

- d. 15-25%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang berbukit hingga pegunungan dengan nilai kemampuan lahan yang kurang baik; dan
- e. 25-40%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi pegunungan hingga dataran yang curam dengan nilai kemampuan lahan yang kurang baik.

Tabel 3.3 Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Banjar

KELERENGAN LAHAN (%)	LUAS WILAYAH (Ha)	PROPORSI (%)
0 - 2	185.634,63	40,54
2 - 8	70.940,96	16,37
8 - 15	53.188,27	11,62
15 - 25	52.178,32	11,51
25 - 40	67.748,57	14,82
> 40	23.934,25	5,16

3.1.2.2 Kondisi Tanah

Secara umum, kondisi tanah pada wilayah Kabupaten Banjar memiliki tekstur yang halus (77,62%) yang meliputi tanah liat, tanah berlempung, tanah berpasir dan berdebu. Kemudian sekitar 14,93% wilayah memiliki tekstur sedang yakni jenis lempung, berdebu, liat berpasir, dan sisanya 5,39% wilayah memiliki tekstur kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu. Terkait dengan kondisi kedalaman tanah yang efektif bagi akar tanaman/tumbuhan sehingga leluasa mengambil air, maka wilayah Banjar ini secara umum lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm memiliki proporsi sebesar 66,45%, selanjutnya wilayah dengan kedalaman efektif antara 60 – 90 cm meliputi 18,72% serta wilayah dengan kedalaman tanah efektif antara 30 – 60 cm hanya sekitar 14,83% dari total luas yang ada.

Selanjutnya terkait dengan kondisi jenis tanah yang ada, wilayah Kabupaten Banjar terbentuk dari jenis tanah organosol dan gleihumus dengan bahan induk dari bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi hampir 28,57% dari luas wilayah keseluruhan. Kemudian tanah aluvial dengan bahan induk aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72% wilayah. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29% wilayah kabupaten. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi

24,84% wilayah. Terakhir adalah jenis tanah kompleks podsolik merah kuning dan latosol dengan bahan induk batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Tabel 3.4 Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Banjar

JENIS TANAH	PROPORSI (%)
Organosol	28,57
Alluvial	3,72
Podsolik Merah Kuning Lateritik	14,29
Podsolik Merah Kuning	5,47
Podsolik Merah Kuning dengan latosol	28,57

3.1.2.3 Hidrologi

Berdasar kondisi hidrologinya, Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air yang melimpah yang berasal dari jaringan sungai dan sistem kanal yang ada. Sebagian besar sungai yang ada mempunyai sumber tangkapan air pada kawasan kaki Pegunungan Meratus dan semuanya mengalir ke barat menyatu membentuk Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan, dan Sungai Riam Kiwa. Ketiga sungai tersebut berair sepanjang tahun sehingga membentuk daerah aliran sungai (DAS). Luas dari tiap DAS tersebut adalah:

1. Riam Kanan, memiliki daerah aliran sungai dengan luas 115.378 Ha atau sebesar 25,31% yang menunjukkan luas DAS yang paling terkecil.
2. Riam Kiwa, yang memiliki daerah aliran sungai dengan 191.132 Ha atau sebesar 41,74% yang dimana menunjukan DAS yang paling terluas.
3. Dan DAS Alalak seluas 150.885 Ha atau sebesar 32,95%.

Selain itu Kabupaten Banjar memiliki bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha yang dijadikan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor dan irigasi bagi wilayah pertanian

3.1.2.4 Klimatologi

Suhu udara disuatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara di daerah Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 18,1° C sampai 33,3° C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (33,3° C) dan suhu minimum terjadi pada bulan November (18,1° C). Selain itu sebagai,

sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata sekitar 72,0 % sampai 94,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Februari, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan April.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tercatat rata-rata 207,8 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada Bulan Agustus (14,9 mm) dan tertinggi terjadi pada Bulan Desember (570,3 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 16 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (28 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan Juli (3 hari). Pada musim kemarau angin timur bertiup dari benua Australia, keadaan angin pada saat itu bisa juga kencang, kecepatan angin yang terjadi rata-rata sebesar 3,4 knots per bulan.

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam bagian wilayah Indonesia, maka wilayah Kabupaten Banjar juga hanya mengenal 2 (dua) musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi ini berkaitan erat dengan arus dan arah angin yang melintasi wilayah Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan bulan September, arus angin berasal dari benua Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari benua Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan sehingga pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Kondisi tersebut berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada rentang bulan April–Mei dan bulan Oktober–November.

Indikasi klimatologi salah satunya adalah kondisi suhu udara. Dalam hal ini, suhu udara pada suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya terhadap kawasan pantai. Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Selain itu sebagaimana daerah tropis, Kabupaten Banjar juga mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi.

Hasil pemantauan iklim di Kabupaten Banjar oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Perkembangan Suhu dan Kelembaban Udara di Kabupaten Banjar

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	22,80	28,37	34,80	48,00	80,55	100,00
Februari	22,40	28,53	34,60	55,00	79,79	99,00
Maret	23,00	28,76	35,40	48,00	79,11	98,00
April	23,90	29,04	34,80	54,00	78,22	98,00
Mei	23,60	29,33	34,80	53,00	78,74	97,00
Juni	22,40	28,30	33,60	54,00	78,61	99,00
Juli	21,20	28,27	33,20	53,00	76,12	100,00
Agustus	21,40	29,38	34,60	45,00	69,91	100,00
September	21,00	28,86	34,80	44,00	73,57	100,00
Oktober	22,00	29,06	34,80	45,00	74,14	100,00
November	23,00	28,20	34,40	50,00	79,57	99,00
Desember	21,90	27,54	33,00	57,00	82,17	99,00

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

Indikator iklim selanjutnya adalah kondisi curah hujan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara pada tiap tempat. Kondisi hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain. Walaupun demikian, tidak semuanya terjadi hubungan yang demikian. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu, musim tersebut dikenal dengan sebutan musim barat. Pada musim kemarau angin timur bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu juga kencang.

Tabel 3.6 Perkembangan Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banjar

Bulan / Month	Jumlah Curah Hujan / Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) / Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari / Duration of Sunshine (%)
Januari	572,40	25	51,85
Februari	334,30	19	49,01

Bulan / Month	Jumlah Curah Hujan / Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) / Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari / Duration of Sunshine (%)
Maret	302,40	23	63,91
April	266,40	22	64,08
Mei	138,00	20	70,40
Juni	218,00	19	53,92
Juli	62,40	17	66,13
Agustus	57,20	11	73,59
September	163,50	20	54,75
Oktober	190,40	16	57,86
November	282,10	20	57,76
Desember	554,40	28	38,15

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

3.1.2.5 Geologi

Secara geologis wilayah Kabupaten Banjar terbentuk dari batuan endapan alluvial, gambut, delta sungai dan rawa yang menyebar hampir disemua kecamatan, kecuali Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan dan Karang Intan. Disebelah timur dari utara sampai ke selatan membentang kaki Pegunungan Meratus yang berbatasan dengan Kecamatan Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Aranio, dan Karang Intan. Khusus Kecamatan Sungai Pinang dan Paramasan struktur geologinya juga dibentuk batuan Maesozoikum dan batuan kapur.

Dari segi jenis tanahnya, Kabupaten Banjar 29,25% wilayahnya merupakan jenis tanah Podsolik Merah Kuning Lateritik dengan luas wilayah 135.932,41 Ha.

Tabel 3.7 Jenis Tanah Di Kabupaten Banjar

No.	Jenis tanah	Luas wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Organosol	79.684,50	17,40
2.	Alluvial	105.074,05	22,95
3.	Podsolik Merah Kuning Lateritik	135.932,41	29,25
4.	Latosol	10.009,24	2,19
5.	Podsolik Merah Kuning	25.058,81	5,47
6.	Podsolik Merah Kuning dengan litosol	94.881,31	20,72
7.	Litosol	9.233,88	2,02

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2019

3.1.2.6 Kemiringan Lereng

Kondisi topografi wilayah seperti keadaan kemiringan lereng sangat penting untuk diketahui karena penataan ruang banya didasarkan pada kondisi topografi suatu wilayah. Demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng.

Ditinjau ketinggian lahan diatas permukaan laut (dpl), maka Kabupaten Banjar dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kelas ketinggian, yaitu sebagai berikut:

- a. 0 – 7 meter diatas permukaan air laut.
- b. 7 – 27 meter diatas permukaan air laut.
- c. 27 – 100 meter diatas permukaan air laut.
- d. 100 – 250 meter diatas permukaan air laut.
- e. 250 meter diatas permukaan air laut.

Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 - 1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk sehingga ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah usaha dimana 35% berada di ketinggian 0 - 7 m dpl, 55,54 % terdapat pada ketinggian 50- 300 m dpl dan sisanya yaitu sebanyak 9,45% berada pada ketinggian lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ketinggian di wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3. 8 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Banjar

No.	Ketinggian Wilayah (m)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	0 – 7	133.818,95	29,23
2.	8 – 25	26.175,61	6,00
3.	26 – 100	70.674,14	15,44
4.	101 – 250	174.898,91	38,20
5.	251 – 500	36.733,50	8,00
6.	> 500	15.563,89	3,13

Sumber: RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032

3.1.2.7 Hidrogeologi

Kabupaten Banjar memiliki sumberdaya air yang melimpah, berasal dari sungai dan banjir/kanal. Sungai yang ada mempunyai tangkapan air di kaki Pegunungan Meratus dan semuanya mengalir ke barat menyatu membentuk Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa. Ketiga sungai itu berair sepanjang tahun dan membentuk daerah aliran sungai (DAS). Luas masing-masing DAS adalah Riam Kanan 115.378 Ha (25,31 DAS Riam Kiwa 191.132 Ha (41,74 %) dan DAS Alalak 150.885 Ha (32,95 %). Kabupaten Banjar juga memiliki bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha yang merupakan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor dan irigasi bagi pertanian.

Selain sumber air dari sungai, anjir/kanal dan waduk, Kabupaten Banjar juga memiliki rawa periodik seluas 55.252 Ha yang sebagian diantaranya kering di musim kemarau Fluktuasi debit air sungai di daerah ini relatif besar, yang tampak dari perbedaan ketinggian airnya musim hujan dan kemarau yang tinggi. Sungai Martapura sepanjang 70 Km dan anak-anak sungainya masih dilayari dan cukup cukup vital perannya dalam pengangkutan barang hasil-hasil pertanian dan tambang. Kabupaten Banjar memiliki 5 (lima) Sub DAS yaitu a) Sub DAS Alalak; b) Sub DAS Aluh-Aluh; c) Sub DAS Barito Hilir; d) Sub DAS Martapura; dan e) Sub DAS Negara. Luasan Sub DASKabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Sub DAS Kabupaten Banjar Tahun 2019

Lokasi Sub DAS	Luas Wilayah (Ha)
Sub DAS Alalak	76.272,67
Sub DAS Aluh-Aluh	76.242,57
Sub DAS Barito Hilir	76.242,57
Sub DAS Martapura	155.630,05
Sub DAS Negara	76.898,21

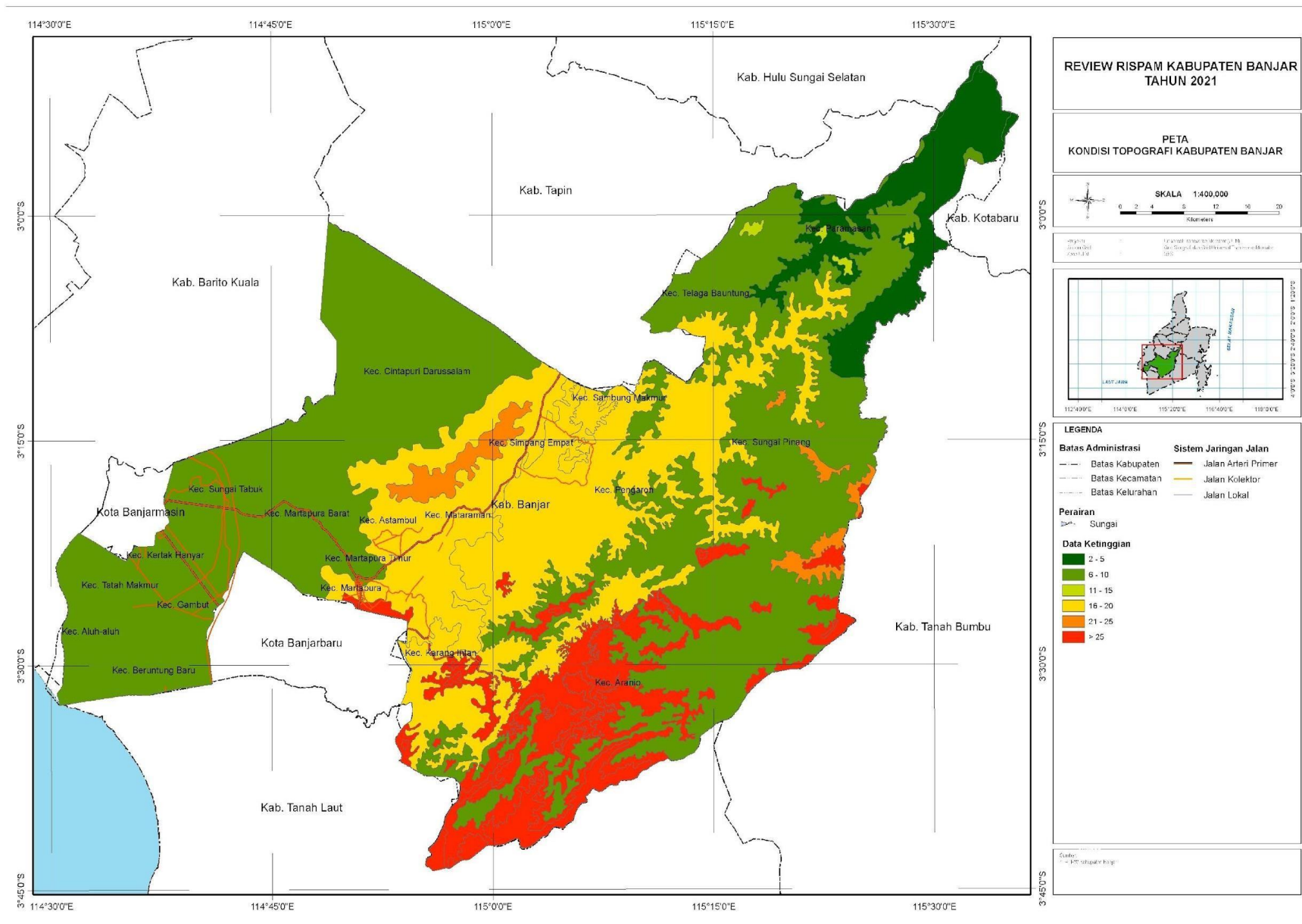
Sumber: BPDAS Kabupaten Banjar 2019 dalam IKPLHD 2019

3.1.2.8 Pola Penggunaan Lahan

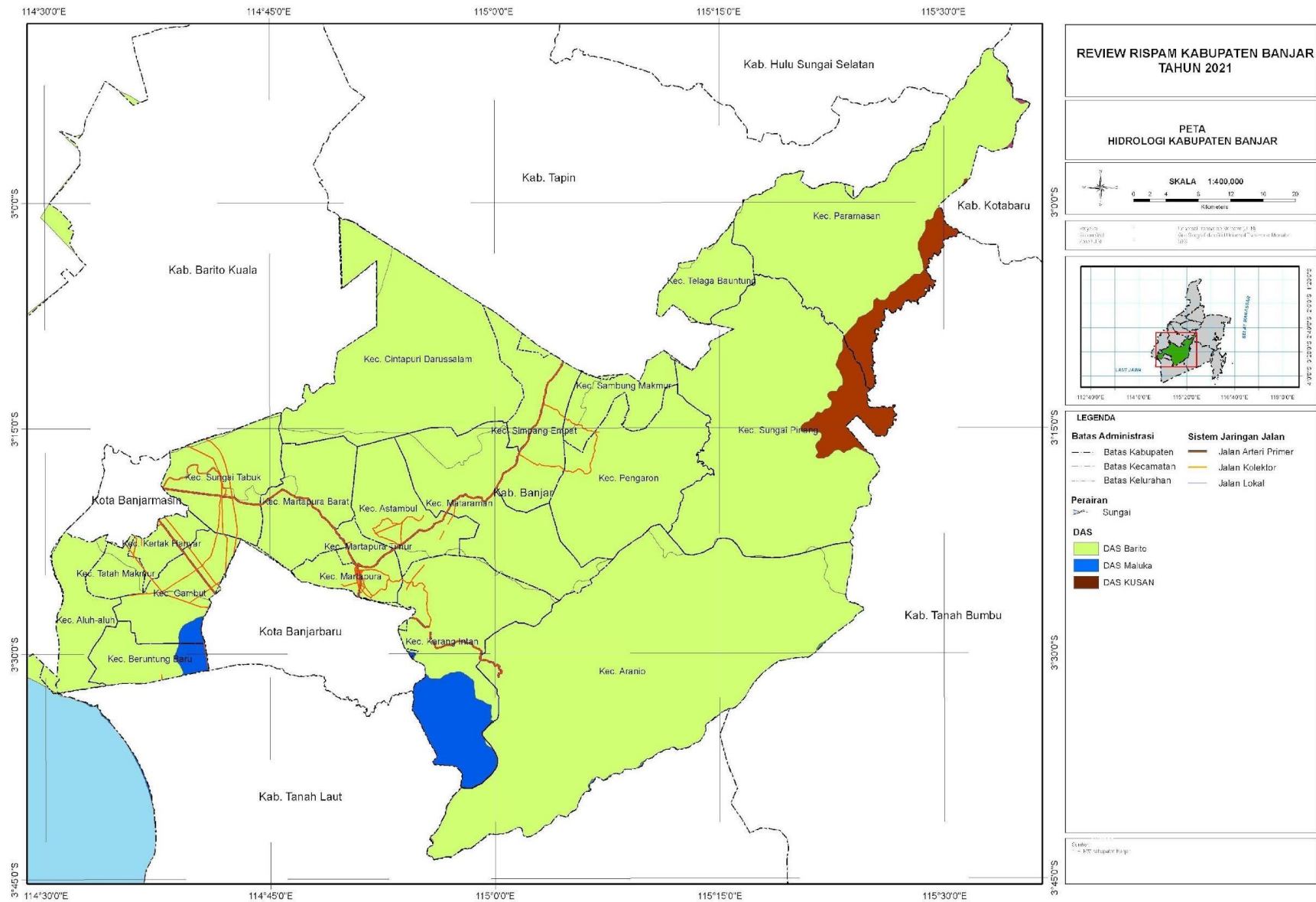
Penggunaan lahan dilakukan melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non-terbangun. Kawasan hutan juga dikonversi untuk lokasi transmigrasi dan

di beberapa lokasi dilakukan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, jalur transmisi listrik, pembangunan tower telekomunikasi dan sebagainya. Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Banjar meliputi:

1. Permukiman. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman baik perkotaan, perdesaan, perdagangan, industri, dan lain-lain yang memperlihatkan pola alur yang rapat.
2. Kebun. Kawasan ini merupakan seluruh kawasan kebun baik yang sudah ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi dapat diperoleh persebaran perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat).
3. Sawah. Kawasan ini merupakan semua aktifitas pertanian di lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang.
4. Sungai. Kawasan ini merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain.
5. Semak/belukar rawa. Kawasan ini merupakan semak/belukar dari bekas hutan di daerah rawa.
6. Rawa. Kawasan ini merupakan kenampakan rawa yang sudah tidak berhutan.
7. Hutan. Kawasan ini merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.



Peta 3. 1 Kondisi Topografis dan kemiringan Lahan



Peta 3. 2 Kondisi Hidrologi (DAS) Wilayah Kabupaten Banjar

Penggunaan lahan di Kabupaten Banjar didominasi oleh guna lahan berupa Hutan Negara dengan luas 86.510 Ha. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banjar.

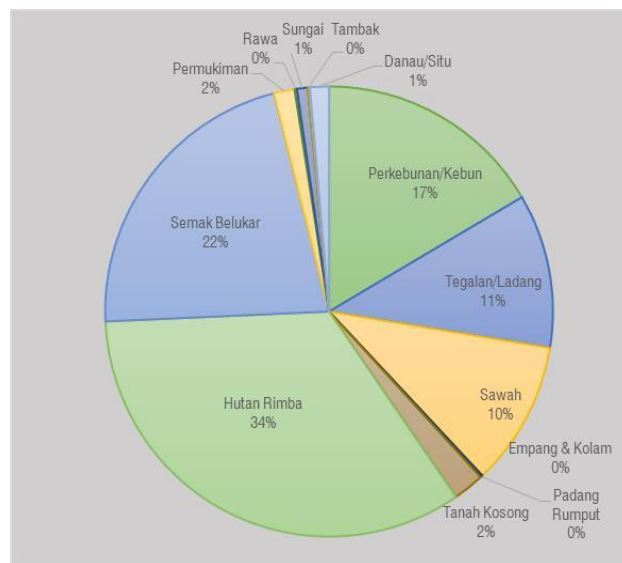
Tabel 3.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjar

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Tegalan	36.378
2.	Ladang	19.465
3.	Perkebunan	53.446
4.	Hutan rakyat	16.709
5.	Tambak	44
6.	Kolam	1.802
7.	Padang Rumput	48.079
8.	Lahan yang tidak diusahakan	35.235
9.	Pekarangan	20.143
10.	Rumah dan Bangunan	15.200
11.	Hutan Negara	86.510
12.	Rawa	12.314
13.	Sawah Irigasi	6.952
14.	Sawah tadah hujan	16.551
15.	Pasang Surut	35.626
16.	Lahan sawah lebak	11.888
17.	Lainnya	50.173

Sumber: RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032

Penggunaan lahan yang melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non-terbangun. Selain untuk perkebunan, kawasan hutan juga dikonversi untuk lokasi transmigrasi dan pada beberapa lokasi dilakukan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, jalur transmisi listrik, pembangunan tower telekomunikasi dan sebagainya. Untuk kawasan yang belum terbangun itu termasuk dengan lahan yang sementara tidak diusahakan yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun tidak diusahakan termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

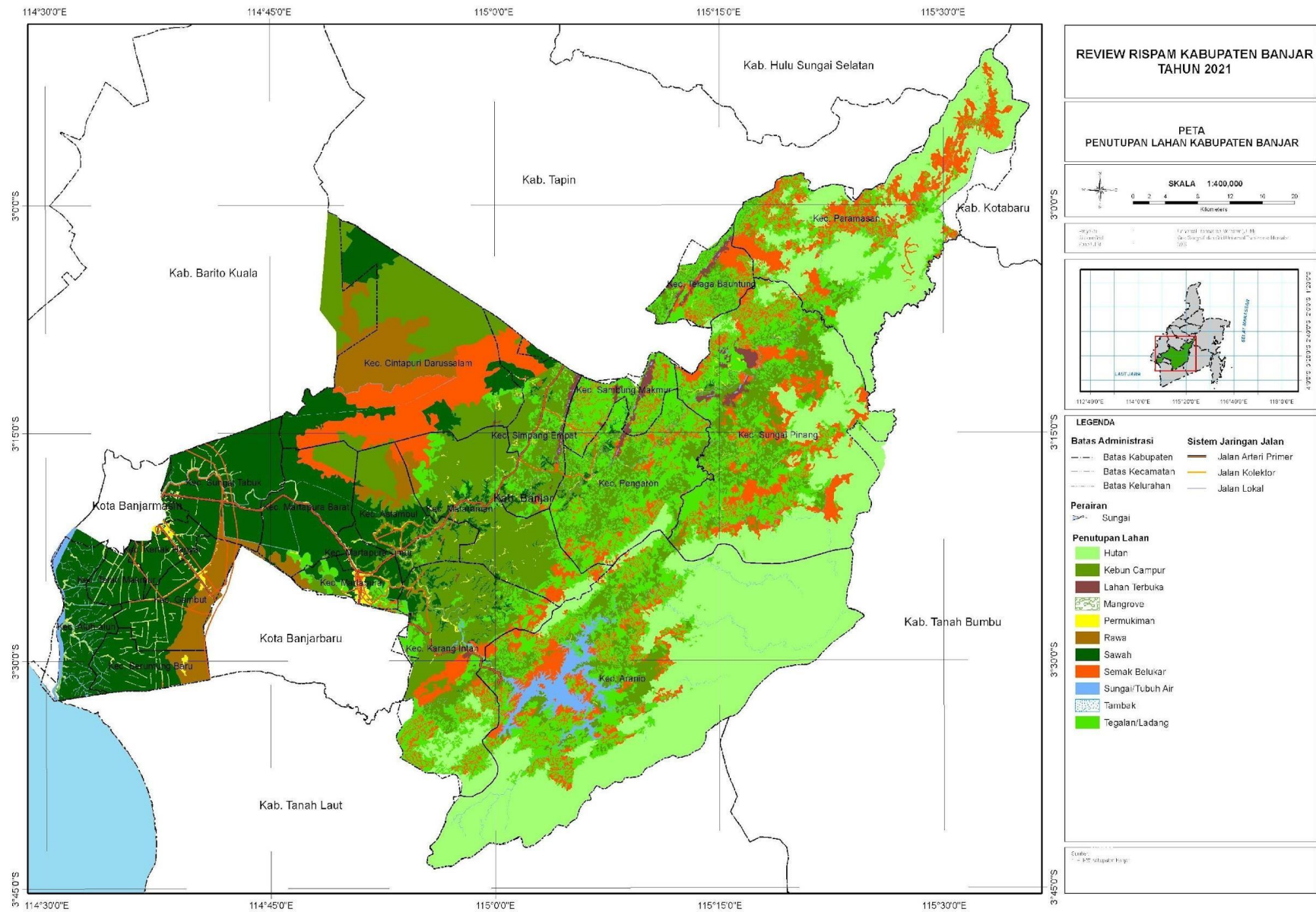
Kondisi penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Banjar terbentuk dari beberapajenis guna lahan, dimana yang cukup dominan membentuk karakter penggunaan lahan kabupaten ini meliputi hutan dan semak belukar yang mencapai 155 dan 99,5 ribu hektar. Kemudian juga, terdapat guna lahan budidaya yang meliputi kawasan perkebunan, tegalan dan pertanian/sawah yang secara keseluruhan mencapai 174 ribu hektar. Selanjutnya, untuk kawasan budidaya permukiman luasannya relatif kecil dibandingkan dengan total luas kabupaten yakni 6,8 ribu hektar.



Gambar 3.1 Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjar

Tabel 3.11. Sebaran Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Banjar

JENIS PENGGUNAANLAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)
Perkebunan/ Kebun	75.635
Tegalan/Ladang	50.669
Sawah	47.581
Empang dan Kolam	152
Padang Rumput	693
Tanah Kosong	10.211
Hutan Rimba	155.155
Semak Belukar	99.542
Permukiman	6.831
Rawa	795
Sungai	3.562
Tambak	557
Sungai	109
Danau	6.783
KAB. BANJAR	457.777



Peta 3. 3 Tutupan Lahan Kabupaten Banjar

3.1.3 SOSIAL KEPENDUDUKAN

Keberadaan penduduk menjadi elemen yang cukup penting dalam mendukung proses pembangunan dikarenakan apabila pertumbuhan dan perkembangan penduduk pada suatu daerah tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dengan tepat oleh daerah tersebut. Namun, apabila pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang ada dikelola dengan baik maka elemen demografi ini diperkirakan dapat menjadi potensi yang dapat memacu atau meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan, Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah sebesar 4.589 km² serta jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2022 sebesar 579.910 jiwa. Apabila diperbandingkan keduanya, maka kepadatan penduduk pada wilayah Kabupaten Banjar sebesar 124 jiwa per km². Bagian wilayah/kecamatan pada Kabupaten Banjar yang memiliki sebaran penduduk paling banyak adalah Kecamatan Martapura dengan jumlah 124.218 jiwa sedangkan kecamatan dengan sebaran penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Telaga Bauntung dengan jumlah sebesar 3.373 jiwa pada tahun 2022. Kondisi persebaran dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banjar selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

Tahun	Jumlah Penduduk
2018	580.026
2019	550.264
2020	565.635
2021	572.109
2022	579.910

Sumber: BPS Kab. Banjar Tahun 2023

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Aluh-Aluh	28.655	82,48	347
2	Beruntung Baru	14.511	61,42	236
3	Gambut	46.815	129,3	362
4	Kertak Hanyar	47.014	45,83	1026
5	Tatah Makmur	12.909	35,47	364

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
6	Sungai Tabuk	66.751	147,3	453
7	Martapura	125.722	42,03	2991
8	Martapura Timur	29.483	29,99	983
9	Martapura Barat	19.269	149,38	129
10	Astambul	34.929	216,5	161
11	Karang Intan	35.894	215,35	167
12	Aranio	9.157	1166,35	8
13	Sungai Pinang	13.976	458,65	30
14	Paramasan	3.765	560,85	7
15	Pengaron	16.761	433,25	39
16	Sambung Makmur	12.139	134,65	90
17	Mataraman	24.837	148,4	167
18	Simpang Empat	23.285	141,1	165
19	Telaga Bauntung	3.373	158	21
20	Cintapuri Darussalam	10.665	312,2	34
Jumlah		579.910	4.668,50	124

Sumber: BPS Kab. Banjar Tahun 2023

3.1.4 PEREKONOMIAN

Perkembangan aktivitas ekonomi yang terdapat pada suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. Begitu pula pada wilayah Kabupaten Banjar, di mana dominasi sektor ekonomi yang menjadi motor penggerak membentuk struktur perekonomian wilayah Kabupaten Banjar berasal dari sektor-sektor primer meliputi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi terbesar kedua yang sebesar 17% dari total PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2017 sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 20%. Aktivitas pertanian tanaman pangan pada wilayah basis seperti Sungai Tabuk, Aluh-aluh dan Kertak Hanya serta aktivitas perkebunan kelapa sawit dan karet pada kawasan Astambul, Mataraman dan Simpang Empat yang mengalami peningkatan produksi diindikasikan sebagai salah satu pendorong berkembangnya sektor ini. Aktivitas pertambangan yang masih dipengaruhi kondisi perekonomian global membuat perlambatan produksi sektor pertambangan meskipun sektor tersebut masih menjadi sektor yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian wilayah Kabupaten Banjar.

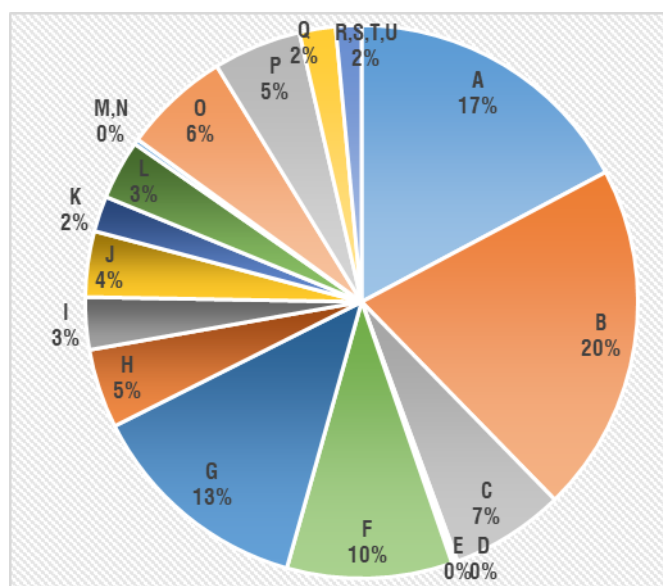
Sektor dari kelompok sekunder seperti sektor konstruksi dan sektor perdagangan dan eceran di Kabupaten Banjar yang memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Aktivitas pembangunan kawasan perumahan pada wilayah sekitar Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru serta pada Perkotaan Martapura membuat sektor konstruksi terus mengalami peningkatan produksi. Kemudian aktivitas perdagangan dan jasa banyak ditopang oleh aktivitas perdagangan komoditas perkebunan perdagangan lokal sehingga membuat produksi sektor ini juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua sektor ekonomi tersebut mampu berkembang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan wilayah Kabupaten Banjar. Selengkapannya perkembangan tiap sektor ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Banjar dalam kurun tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan	1.849,53	1.876,69	1.932,76	2.024,98	1.984,47
2. Pertambangan Dan Penggalian	2.135,79	2.231,74	2.332,69	2.304,15	2.116,41
3. Industri Pengolahan	687,16	727,49	755,70	782,11	759,67
4. Pengadaan Listrik dan Gas	12,70	12,81	13,78	14,37	15,04
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	22,51	24,28	25,43	26,89	27,96
6. Konstruksi	1.002,39	1.055,63	1.119,32	1 185,64	1 175,71
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.350,85	1.440,52	1.539,14	1.640,12	1.575,62
8. Transportasi dan Pergudangan	470,63	505,39	540,39	579,66	561,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	314,19	333,34	355,54	380,17	378,51
10. Informasi dan Komunikasi	388,05	418,86	441,99	473,47	514,46
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	215,85	226,76	235,50	239,52	244,89
12. Real Estat	367	378,92	396,35	417,84	434,90
13. Jasa Perusahaan	31,75	34,03	35,74	38,28	37,82
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	665,31	680,56	706,27	768,77	785,85
15. Jasa Pendidikan	532,49	561,86	599,92	644,40	653,97
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,45	231,37	244,24	260,38	280,54
17. Jasa Lainnya	153,03	163,72	175,46	187,53	186,96

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Produk Domestik Regional Bruto	10.418,68	10.903,97	11.450,22	11.968,28	11.734,08

Sumber: RISPAM Kab. Banjar Tahun 2021



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi di Kabupaten Banjar Tahun 2019

Tabel 3.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banjar (persen) Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	4,99	1,47	2,99	4,77	-2,00
2. Pertambangan Dan Penggalian	-0,48	4,49	4,52	-1,22	-8,15
3. Industri Pengolahan	5,47	5,87	3,88	3,50	-2,87
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	0,80	7,63	4,25	4,64
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	7,70	7,87	4,77	5,72	3,97
6. Konstruksi	6,29	5,31	6,03	5,92	-0,84
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	6,64	6,85	6,56	-3,93
8. Transportasi dan Pergudangan	8,41	7,39	6,93	7,27	-3,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,71	6,10	6,66	6,93	-0,44
10. Informasi dan Komunikasi	8,65	7,94	5,52	7,12	8,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	5,05	3,85	1,70	2,24
12. Real Estat	6,35	3,25	4,60	5,42	4,08
13. Jasa Perusahaan	8,33	7,16	5,03	7,13	-1,22

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,04	2,29	3,78	8,85	2,22
15. Jasa Pendidikan	6,42	5,52	6,77	7,41	1,49
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	5,43	5,56	6,61	7,74
17. Jasa Lainnya	8,73	6,98	7,17	6,88	-0,31
Produk Domestik Regional Bruto	4,70	4,66	5,01	4,52	-1,96

Sumber: RISPAM Kab. Banjar Tahun 2021

Dari Tujuh Belas pembentuk PDRB, sektor pertambangan dan pertanian masih menjadi sektor dominan pembentuk PDRB Kabupaten Banjar. Besarnya peranan sektor pertambangan dan pertanian didukung oleh kondisi sumberdaya alam Kabupaten Banjar disamping ekonominya yang cenderung agraris serta tenaga kerja yang bekerja di sektor ini relatif banyak.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2018-2022 dapat dilihat pada perkembangan PDRB atas harga berlaku dan atas dasar harga berlaku. Gambaran dari PDRB Kabupaten banjar tahun 2018– 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Distribusi persentase PDRB Atas Harga Berlaku (%)

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022*	Proentase
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture,</i> <i>Forestry, and Fishing</i>	2758,92	2949,76	2917,83	3008,17	3176,23	15,07
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and</i> <i>Quarrying</i>	2497,47	2419,57	2231,37	2883,49	4860,82	23,07
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1098,86	1143,04	1130,2	1223,63	1321,49	6,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	21,88	23,46	25,25	27,11	29,45	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage,</i> <i>Waste Management, and</i>	35,14	37,86	39,74	42,12	47,70	0,23
	<i>Remediation Activities</i>						

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022*	Proentase
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1602,86	1741,06	1732,04	1855,07	2020,99	9,59
G	Perdagangan Besar dan	2260,27	2493,03	2419,9	2568,43	2882,38	13,68
	Eceran; Reparasi Mobil dan						
	Sepeda Motor/ <i>Wholesale</i>						
	<i>and Retail Trade; Repair</i>						
	<i>of Motor Vehicles and</i>						
	<i>Motorcycles</i>						
H	Transportasi dan	731,65	806,15	792,30	819,43	903,64	4,29
	Pergudangan/						
	<i>Transportation and Storage</i>						
I	Penyediaan Akomodasi	492,93	542,69	549,31	576,06	632,35	3,00
	dan Makan Minum/						
	<i>Accommodation and Food</i>						
	<i>Service Activities</i>						
J	Informasi dan Komunikasi/	567,23	623,65	676,07	740,45	800,48	3,80
	<i>Information and</i>						
	<i>Communication</i>						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	345,33	366,63	376,8	403,65	414,57	1,97
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	525,4	567,61	596,43	643,28	683,46	3,24
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	55,53	61,73	62,26	65,03	71,46	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public</i>	1101,85	1224,17	1270,84	1261,9	1290,26	6,12
	<i>Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>						
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	856,94	952,53	988,69	1039,07	1086,67	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan	353,98	383,24	426,49	475,24	519,10	2,46
	Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>						
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	262,84	289,91	291,87	302,19	330,69	1,57
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	15569,05	16626,08	16527,38	17934,28	21071,72	100

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2023

3.1.4.1 Potensi Ekonomi

a. Kondisi saat ini

Berdasarkan perkembangan ekonomi Kabupaten Banjar mulai tahun 2007 s/d 2011 terlihat bahwa ekonomi Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan rata-rata 7.59 %. Apabila dilihat dari sektor-sektor pembentukan PDRB maka terjadi konjungtur terhadap pertumbuhannya, khususnya terlihat pada tahun 2012 dimana terjadi perubahan pada setiap sektor usaha, yaitu a) sektor pertambangan dan penggalian, b) sektor listrik, gas, dan air, c) sektor bangunan, dan d) sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan 5 (lima) sektor yang mengalami penurunan, yaitu a) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, b) sektor industri pengolahan, c) sektor pengangkutan dan komunikasi, d) sektor keuangan, persewaan, dan e) sektor jasa perusahaan. Secara lengkap pertumbuhan PDRB pertahun sebagaimana tercantum pada tabel 3.16. di atas.

b. Perkiraan Kedepan

Dengan demikian, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan perkiraan 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini di pergunakan model pertumbuhan sederhana yaitu :

$$1.1. Y_t = Y_0 (r+1)^n$$

Y_t = Perkiraan PDRB Tahun ke n

Y_0 = PDRB Tahun dasar

r = Rata – Rata Pertumbuhan

n = Jumlah Tahun

Untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2018 sekitar 7,00 % per tahun dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. mengurangi angka pengangguran dan penduduk miskin;
- c. meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan sektor-sektor dominan, yang menjadi ciri khas perekonomian Daerah; dan
- d. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas bagi warga Kabupaten.

3.1.4.2 Kondisi Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Komponen Keuangan Daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Daerah

Data keuangan Kabupaten Banjar dapat dilihat dari beberapa data, yaitu terkait realisasi pendapatan dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tabel 3. 17 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banjar (rupiah) 2017-2020

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	179.714.918.679	189.478.934.878	223.039.721.642	203.777.790.537
Pajak Daerah	66.632.374.970	72.021.842.947	80.830.944.474	76.869.290.687
Retribusi Daerah	7.183.346.363	4.189.906.671	6.424.683.089	5.087.205.588
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.787.200.322	8.478.950.429	2.445.796.650	4.373.163.319
Lain-lain PAD yang sah	99.111.997.023	104.788.234.831	133.338.297.428	117.448.130.943
Pendapatan Transfer	1.385.496.109.405	1.515.799.680.523	1.631.214.352.393	1.256.310.532.445
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.074.257.384.910	1.207.279.772.566	1.274.094.517.588	1.107.101.678.205
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	216.654.295.000	206.131.942.000	237.529.773.000	43.693.822.000
Transfer Pemerintah Provinsi	94.584.429.495	102.387.965.957	119.590.061.805	105.515.032.240
Lain-lain Pendapatan yang sah	64.388.440.533	48.936.452.339	47.396.550.000	4.684.325.000
Pendapatan Hibah	64.388.440.533	48.936.452.339	47.396.550.000	4.684.325.000
Dana Darurat	-	-		
Lainnya	-	-		
Jumlah	1.629.599.468.617	1.754.215.067.740	1.901.650.624.035	1.464.772.647.982

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar 2017-2020

Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020
Belanja Operasi	1.104.772.439.366	1.130.540.529.382	1.242.737.235.680	1.184.100.605.113
Belanja Pegawai	676.343.329.164	642.155.280.875	765.141.053.447	786.659.076.927
Belanja Bunga	91.698.287.380	448.884.788.014	437.046.774.017	292.851.943.956
Belanja Hibah	31.103.213.463	34.425.904.804	33.034.118.137	97.010.698.180
Belanja Bantuan Sosial	5.627.609.359	5.074.555.689	7.515.290.079	7.578.886.050
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Belanja Modal	234.147.478.392	264.582.388.659	339.715.761.520	157.131.930.949
Belanja Tanah	1.715.378.606	351.964.200	1.264.431.099	2.930.252.335

Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020
Belanja Peralatan dan Mesin	48.117.580.284	92.896.001.670	85.357.897.618	53.269.742.493
Belanja Gedung dan Bangunan	42.730.985.803	46.932.084.024	50.195.768.735	43.288.428.599
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	139.809.772.865	111.755.069.669	188.586.725.269	53.708.960.430
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.641.499.470	11.457.158.095	12.832.247.298	3.268.036.560
Belanja Aset Lainnya	132.261.364	1.190.111.000	1.478.691.500	666.510.532
Belanja Tak Terduga	-	774.992.020	-	51.271.162.776
Transfer	315.615.730.700	284.416.122.785	330.002.091.174	113.854.800.960
Bagi Hasil Pajak	5.734.659.459	-	7.467.198.344	4.216.848.750
Bagi Hasil Retribusi	-	5.692.162.085	758.320.518	372.093.978
Bantuan Keuangan ke Desa	308.581.679.241	277.750.568.700	-	-
Bantuan Keuangan Lainnya	1.299.392.000	973.392.000	321.776.572.312	109.265.858.232
Jumlah	1.654.535.648.459	1.680.314.032.846	1.912.455.088.376	1.506.358.499.799

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

PDRB merupakan pencerminan dari nilai barang dan jasa yang telah diproduksi oleh unit-unit produksi/perusahaan selama satu tahun di daerah. Oleh sebab itu PDRB dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam memberikan sumber penghidupan dan penghasilan kepada berbagai golongan dalam masyarakat atau dapat dikatakan sebagai penggambaran pendapatan penduduk suatu wilayah baik secara menyeluruh maupun secara sektoral.

Tabel 3.19 Peta Perekonomian Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019

Deskripsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)	9.950,52	10.418,68	10.903,97	11.449,81	11.969,53
Pendapatan perkapita (juta rupiah/orang)		10.418,68	10.903,97	11.450,22	11.968,28
Pertumbuhan ekonomi (%)		4,70	4,66	5,01	4,52

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Menurut Jenisnya di Kabupaten Banjar, 2020

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Retribusi Jasa Umum				
01	Pelayanan Kesehatan/ Health Services	473 700 000	744 648 450	157,20

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
02	Pengujian Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle Testing	495 860 000	298 541 000	60,21
03	Pengendalian Menara Telekomunikasi	400 000 000	468 990 000	117,25
04	Pelayanan Tera /Tera Ulang	30 000 000	36 715 250	122,38
Retribusi Jasa Usaha				
05	Pemakaian Kekayaan Daerah	385 700 000	421 125 964	109,18
06	Terminal	60 000 000	32 575 000	54,29
07	Tempat Khusus Parkir	86 550 000	62 850 000	72,62
08	Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa	213 413 800	181 540 000	85,06
09	Rumah Potong Hewan	126 000 000	129 768 000	102,99
10	Pelayanan Pelabuhan	1 500 000	2 350 000	156,67
11	Tempat Rekreasi Dan Olahraga	10 320 000	10 335 000	100,15
12	Penjualan Produksi Usaha Daerah	92 530 000	124 373 000	134,41
13	Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia	75 000 000	75 020 000	100,03
Retribusi Perizinan Terpadu				
14	Izin Mendirikan Bangunan	2 200 000 000	2 429 075 350	110,41
15	Izin Trayek	36 586 200	54 330 084	148,50
16	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	70 750 000	24 750 000	34,98
Jumlah/ Total		4 757 910 000	5 096 987 098	107,13

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

b. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran di Kabupaten Banjar atas dasar harga Produk Domestik Regional Bruto dalam miliar rupiah sebesar 16.615,43. Berikut merupakan tabel hasil pengeluaran kabupaten banjar dari tahun 2015-2019

Tabel 3.21 Pengeluaran di Kabupaten Banjar (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8 282,00	8 887,25	9 572,76	10.353,56	11 313,01
Pengeluaran Konsumsi LNPR	116,13	125,75	137,77	152,18	169,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 878,42	1 963,99	2 018,51	2 161,06	2 329,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 780,80	4 038,01	4 321,97	4 799,13	5 319,08
Perubahan Inventori	- 5,57	7,53	73,08	226,71	7,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 570,90	-1 682,56	-1 712,11	-2 123,08	-2 523,54
Produk Domestik Regional Bruto	12 480,88	13 339,97	14 411,98	15 569,56	16 615,43

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

c. Pembiayaan Daerah

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, 2018

Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1. Penerimaan Pembiayaan	116.251.333.774,88	116.250.833.774,88	100,00
1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	116.251.333.774,88	116.250.833.774,88	100,00
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3 Penerimaan Hasil Investasi Permanen	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
3. Pembiayaan Neto	116.251.333.774,88	116.250.833.774,88	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	190.151.868.668,90	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2021

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, 2019

Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1. Penerimaan Pembiayaan	116.250.833.774,88	190.151.868.668,90	163,57
1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	116.250.833.774,88	190.151.868.668,90	163,57
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3 Penerimaan Hasil Investasi Permanen	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
3. Pembiayaan Neto	116.250.833.774,88	190.151.868.668,90	163,57
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	179.340.524.327,76	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2021

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, 2020

Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1. Penerimaan Pembiayaan	179.340.524.327,76	179.340.524.327,76	100,00
1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	179.340.524.327,76	179.340.524.327,76	100,00
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.3 Penerimaan Hasil Investasi Permanen	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.1 Pembiayaan Neto	179.340.524.327,76	179.340.524.327,76	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	131.923.380.925,41	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2022

3.1.5 FUNGSI DAN PERAN KABUPATEN BANJAR

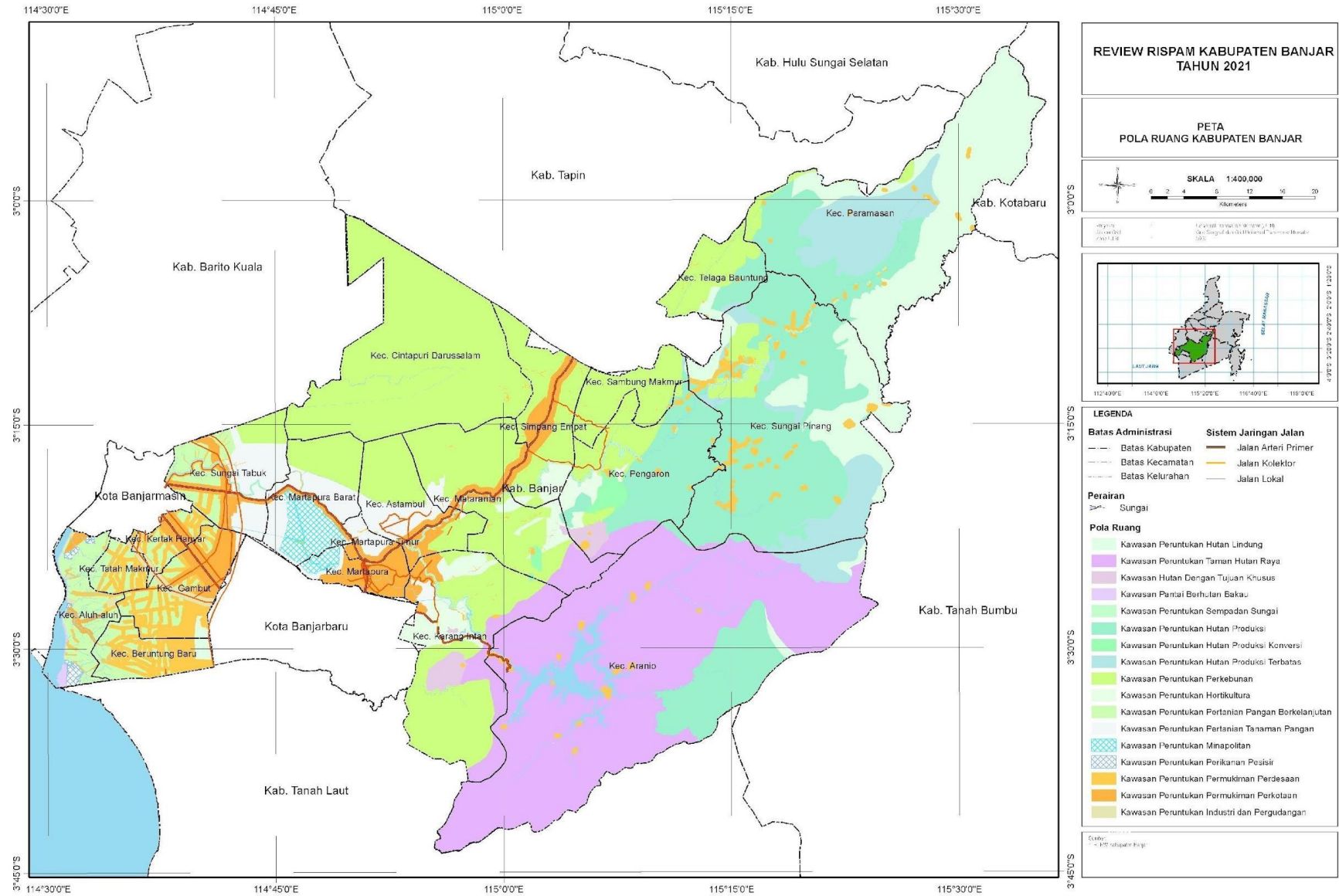
3.1.5.1 Fungsi Kabupaten / Kota

Pengembangan fungsi – fungsi Kota di Kabupaten Banjar tergantung pada hirarki Kota-kota tersebut yang berdasarkan hirarki jumlah penduduk dan hirarki fungsional serta potensi sektoral. Adapun peran Kabupaten Banjar sendiri ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki, antara lain wisata religi dan sebagai penghasil batu permata. Banyaknya wisata religi yang berupa tempat pemakaman para ulama yang mensyiarkan ajaran Islam di Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Disamping wisata religi pemakaman, juga terdapat icon Martapura yang berupa Masjid Al Karamah. Kabupaten Banjar juga dikenal sebagai penghasil batu permata, terutama di Martapura, terlebih lagi hal ini ditunjang dengan keberadaan pusat perdagangan yang memasarkan hasil batu permata (CBS). Pusat perdagangan CBS memiliki skala pelayanan nasional karena daerah pemasarannya hingga luar Pulau Kalimantan. Dengan potensi yang dimilikinya, hal ini menjadikan Kabupaten Banjar memiliki peran sebagai pusat wisata religi dan wisata belanja batu permata.

3.1.5.2 Peranan Kabupaten / Kota

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat- pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani

perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah. Pengembangan pusat – pusat kegiatan diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.



Peta 3. 4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Banjar

3.2 KONDISI SPAM KABUPATEN BANJAR

2.2.1 Kondisi SPAM PDAM

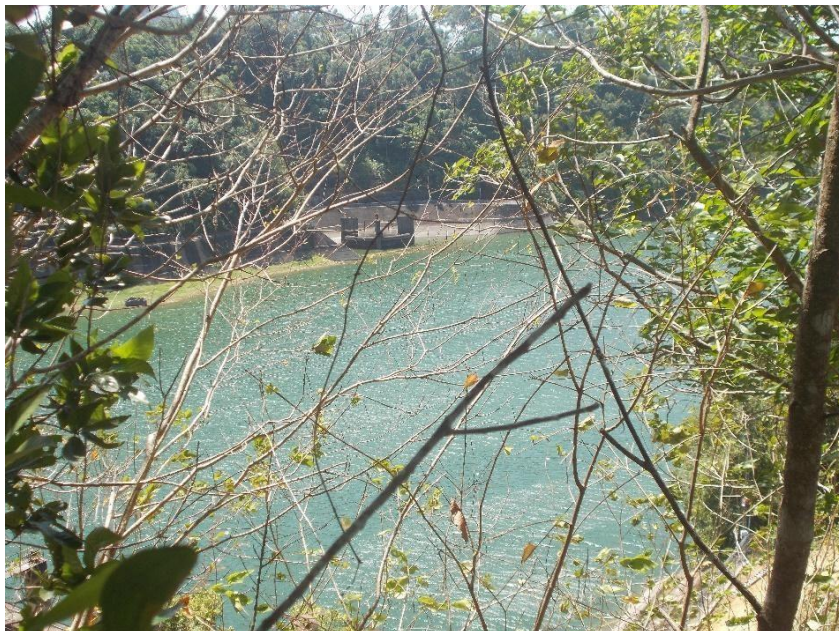
Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar untuk wilayah perkotaan yang dilayani oleh PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar terutama untuk ibukota Kabupaten Banjar yang berlokasi di Kecamatan Martapura dan wilayah- wilayah lain yang termasuk ibukota Kecamatan (IKK).

2.2.1.1 SPAM Ibukota Kabupaten

❖ Jaringan Perpipaan (JP)

1. Unit Air Baku

Unit air baku yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum sebagian besar berasal dari sungai, dimana PDAM INTAN BANJAR Kabupaten Banjar memanfaatkan air permukaan, yaitu Bendungan Riam Kanan serta sungai riamkiwa.



Gambar 3.3 Intake Sungai Riam Kiwa

2. Unit Produksi

Unit produksi di Ibukota Kabupaten terdiri dari 1 IPA yang terdapat pada kota Banjarbaru (IPA Pinus), IPA Pinus terdiri dari 6

bangunan pengolahan. Kapasitas IPA Pinus yang terpasang sebesar 400 L/detik sedangkan kapasitas produksinya hanya 374,40 L/detik. Sehingga masih ada idle capacity 25,6 L/detik. Adapun kinerja unit produksi di SPAM Ibukota Kabupaten ditunjukkan pada tabel 3.25

Tabel 3.25. Kinerja Unit Produksi SPAM Ibukota Kabupaten Banjar Tahun 2021

NO	UNIT KERJA/KAP. TERPASANG			Dipa sang (Th.)	Merk	Kapasitas riil	Idle Capaci ty	Efektifitas	Ket.
						(l/s)	(l/s)	(%)	
1	BNA	400	lps			374,40			
	. WTP Paket Baja	10	lps		Maswandi	9,75	0,25	97,5	
	. WTP Paket Baja	20	lps	1994	Ruhak	17,75	2,25	88,75	
	. WTP Paket Baja	30	lps	1999	Maswandi	27,25	2,75	90,83	
	. WTP Paket Baja	50	lps	1997	GE	42	8	84	
	. WTP Paket Baja	60	lps	2006	Maswandi	45,5	14,5	75,83	
	. WTP Banjarbakula	230	lps	2013		232,15	- 2,15	100,93	

Sumber; RISPAM 2021



Gambar 3.4 IPA Pinus

3. Unit Distribusi

Unit distribusi di IPA PINUS di Ibukota Kabupaten mendistribusikan air sebesar 10.480.182 m³ dengan air yang terjual 5.698.336 m³, sehingga terdapat kebocoran air sebesar 4.781.846 m³. Sistem distribusi yang digunakan di IPA Pinus adalah sistem pemompaan.



Gambar 3.5 Pompa Distribusi IPA Pinus

4. Unit Pelayanan

Menurut data cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar di Kabupaten Banjar, di IPA Pinus dalam data PDAM bulan Maret 2021 jumlah SR di wilayah layanan (Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru) sebesar 40.607 SR dengan jiwa yang terlayani sebanyak 427.047 jiwa, sehingga dalam prosentase sebesar 36,69%.

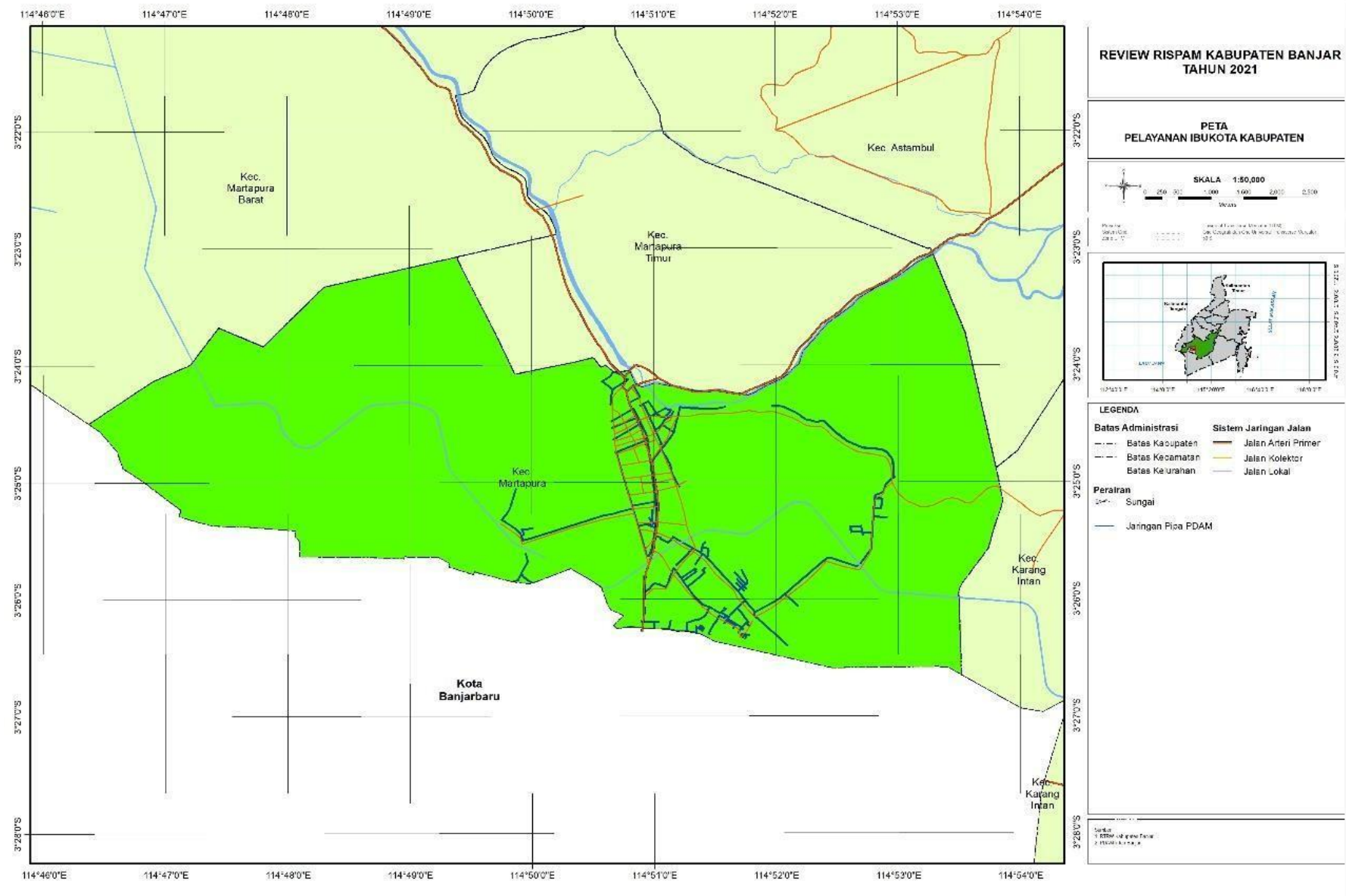
Tabel 3.26 Cakupan Pelayanan PDAM Intan Banjar Ibukota Kabupaten Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah Sambungan (buah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
1.	BNB (Banjarbaru-Martapura)	40.607	427.047	36,69

Sumber : RISPAM 2021

Tingkat distribusi air di Ibukota Kabupaten Banjar tahun 2021 dari bulan Januari-Juni mencapai 1.887.897 m³, dan air curah dari Banjar Bakula dan IPA Syarkawi mencapai 8.592.285 m³ dan hingga bulan Juni tahun 2021 tingkat pemakaian air berdasarkan jumlah air yang terjual adalah sebesar 5.698.336 m³.

Berdasarkan besaran tingkat air yang terjual dapat diketahui pemakaian rata- rata air di wilayah pelayanan unit SPAM Ibukota Kabupaten Banjar ini adalah sebesar = $5.698.336 \text{ m}^3 / 40.607 \text{ SR} / 12 \text{ bulan} = 11,69 \text{ m}^3 / \text{SR} / \text{bln} = 97,42 \text{ liter} / \text{org} / \text{hari}$.



Peta 3.5 Pelayanan Air Minum Ibukota Kabupaten

2.2.1.2 SPAM IKK (Ibukota Kecamatan)

❖ Jaringan Perpipaan (JP)

1. Unit Air Baku

Unit air baku yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum sebagian besar didapatkan dari sungai, PDAM INTAN BANJAR Kabupaten Banjar memiliki 11 Unit Pengolahan Air (IPA) yang terdapat pada 11 kecamatan wilayah studi. Sumber air yang digunakan paling banyak memanfaatkan Sungai Martapura, sungai Riam Kiwa dan Sungai Riam Kanan. Berikut merupakan beberapa sumber air baku yang digunakan:

Untuk kondisi air baku di Kabupaten Banjar secara umum kualitas nya semakin lama semakin menurun, khususnya di sungai riam kiwa dimana saat musim kemarau kualitasnya bagus namun kuantitas nya kurang dan sebaliknya saat musim penghujan kualitas air baku menurun namun kuantitas nya melimpah.



Gambar 3.6 Sungai Martapura dan Intake IKK Astambul di Kecamatan Astambul



Gambar 3.7 Sungai Martapura Dan IKK Mataraman



Gambar 3.8 Sungai Riam Kiwa dan Intake unit IKK Pengaron



Gambar 3.9 Sungai Riam Kiwa dan Intake unit IKK Sungai Pinang



Gambar 3.10 Sungai Martapura dan Intake IKK Sungai Tabuk

Sumber air baku yang terdapat pada 11 (sebelas) instalasi pengolahan air tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan wilayah studi seperti gambar diatas merupakan air permukaan atau sungai. Sistem pengambilan di masing-masing IPA di IKK menggunakan sistem Intake kemudian ditransmisikan ke unit pengolahan (IPA Paket) dengan menggunakan pompa. Sungai-sungai tersebut debitnya cukup besar sehingga bila di musim kemarau ketersediaannya masih sangat cukup. Berikut disajikan data mengenai sumber air baku PDAM yang ada di Kabupaten Banjar:

Tabel 3.27 Sumber Air Baku PDAM di Kabupaten Banjar

NO	Nama Cabang	Intake	Nama Sumber Air Baku
1	IPA I STM Banjarbaru	-	Distribusi PDAM Intan
2	IPA II Pinus Pinus Banjarbaru	Sungai	Sungai Riam Kanan (irigasi)
3	Cabang I Landasan Ulin	Sumur Dalam	Karang Jawa * SMP * Sumur Dalam
4	Cabang II Kertak Hanyar	-	Distribusi PDAM Bandarmasih

NO	Nama Cabang	Intake	Nama Sumber Air Baku
5	Cabang II Sungai Tabuk	Sungai	Sungai Martapura
6	Cabang III Astambul	Sungai	Sungai Martapura
7	Cabang III Mataraman	Sungai	Sungai Martapura
8	Cabang III Simpang Empat	Sungai	Sungai Riam Kiwa
9	Cabang III Pengaron	Sungai	Sungai Riam Kiwa
10	Cabang III Sungai Pinang	Sungai	Sungai Riam Kiwa
11	Unit Karang Intan Karang Intan (Mali- Mali)	Sungai	Sungai Riam Kanan

Sumber: RISPAM 2021

2. Unit Produksi

Air baku dari sungai yang digunakan sebagai air baku di 11 IKK tersebut diolah pada instalasi pengolahan air (IPA). Adapun sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi dengan menggunakan IPA PAKET. Untuk mengetahui beberapa proses yang digunakan pada 11 IKK pada beberapa kecamatan di wilayah studi dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.11 Unit Prasedimentasi PDAM Intan Banjar



Gambar 3.12 Unit Filter PDAM Intan Banjar



Gambar 3.13 Unit Sedimentasi PDAM Intan Banjar



Gambar 3.14 Unit Koagulasi Flokulasi PDAM Intan Banjar



Gambar 3.15 IPA I PTN dengan kapasitas 15L/dt di Cabang II Sungai Tabuk



Gambar 3.16 IPA II Maswandi dengan kapasitas 5L/dt di Cabang II Sungai Tabuk



Gambar 3.17 IPA I Ruhak dengan kapasitas 50L/dt di Cabang II Kertak Hanyar



Gambar 3.18 IPA II WKE dengan kapasitas 20L/dt di Cabang II Kertak Hanyar



Gambar 3.19 Eks. Pengolahan pada IPA I STM



Gambar 3.20 IPA Unit I IKK Astambul



Gambar 3.21 IPA Unit I IKK Mataraman



Gambar 3.22 IPA Unit II IKK Simpang Empat



Gambar 3.23 IPA Unit II IKK Pengaron



Gambar 3.24 IPA Unit IKK Sungai Pinang



Gambar 3.25 IPA Syarkawi Cabang I Kap. 350 L/detik



Gambar 3.26 IPA Sambung Makmur Cabang III Kap. 20 L/detik

Berikut disajikan tabel kapasitas terpasang dan realisasi produksi pada Tahun 2020:

Tabel 3.28 Kapasitas Terpasang, Realisasi dan *Idle Capacity* PDAM Tahun 2023

NO	UNIT KERJA/ KAP. TERPASANG			Dipasang	Merk	Kapasitas Produksi	Idle Capacity	Optimalisasi	Keterangan
				(Th.)		(l/s)	(l/s)	(%)	
1	Kantor Pusat	570	lps					0,00	
	. WTP Paket Baja	10	lps		M. Wandu	7	3	70	
	. WTP Paket Baja	20	lps	1994	Ruhak	20		100	
	. WTP Paket Baja	30	lps	1999	M. Wandu	29	1	96,67	
	. WTP Paket Baja	50	lps	1997	GE	37	13	74	
	. WTP Paket Baja	60	lps	2006	M. Wandu	44	16	73,33	
	. WTP Banjarbakula	400	lps	2015		372	28	93,00	
2	Cabang I	390	lps						
	. IPA Syarkawi	390	lps	2014	Drupadi	346	44	88,72	
3	Cabang II	85	lps						
	<i>IPA Sei Tabuk</i>								
	. WTP Paket Baja	-	lps		M. Wandu				Tidak aktif
	. WTP Paket Baja	15	lps	1991	M. Wandu		15	-	
	<i>IPA K. Hanyar</i>								
	. WTP Paket Baja	20	lps	2003	WKI	10	10	50,00	
	. WTP Paket Baja	50	lps	2005	Ruhak	41	9	82,00	
4	Cabang III	77,5	lps						
	<i>IPA Astambul</i>								
	. WTP Paket Baja	10	lps	1991		9	1	90	
	<i>IPA Mataraman</i>								
	. WTP Paket Baja	15	lps	1996	GE	16	4	80	
	. WTP Paket Baja	5	lps						

NO	UNIT KERJA/ KAP. TERPASANG			Dipasang	Merk	Kapasitas Produksi	Idle Capacity	Optimalisasi	Keterangan
				(Th.)		(l/s)	(l/s)	(%)	
	IPA Pengaron								Distribusi dari Sambung Makmur
	. WTP Paket Baja	5	lps	1993	M. Wandu	0		0	
	IPA S. Empat								
	. WTP Paket Baja	12,5	lps	1994	M. Wandu	10	2,5	80	
	IPA Sungai Pinang								
	. WTP Paket Baja	10	lps	2014	Jasuka	6	4	60	
	IPA Sambung Makmur								
	. WTP Paket Baja	20	lps	2015	WKE	10	10	50	
	TOTAL	1.122,5	lps			957	160,5	85,26	

Sumber: PTAM Intan Banjar, Desember 2023

3. Unit Distribusi

Bangunan *reservoir* yang digunakan di instalasi pengolahan air di kecamatan wilayah studi ialah jenis *ground reservoir*. Rencana pendistribusian air hasil produksi dilakukan secara dengan dua sistem yaitu dengan pemompaan dan gravitasi.

Unit Cabang I Landasan Ulin menggunakan sistem pemompaan dan gravitasi dalam distribusinya karena wilayah yang dilayani memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian Unit Cabang I Landasan Ulin.



Gambar 3.27 Pipa Distribusi (transmisi) Cabang I Landasan Ulin

Unit IPA I STM (aerator) menggunakan sistem pemompaan dalam distribusinya karena desa yang dilayani memiliki ketinggian yang relatif datar dan setara dengan ketinggian Unit Unit IPA I STM (aerator).



Gambar 3.28 Pipa Distribusi (transmisi) IPA I STM (Aerator)

Kecamatan Pengaron menggunakan sistem pemompaan dalam distribusinya karena desa yang dilayani memiliki ketinggian yang relatif datar dan setara dengan ketinggian Unit Cabang III Pengaron.



Gambar 3.29 Pompa distribusi dan Reservoar di IPA Cabang III Pengaron

Kecamatan Astambul menggunakan sistem pemompaan dan gravitasi dalam distribusinya karena desa yang dilayani memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian Unit Cabang III Astambul.

Unit Pompa pada PDAM INTAN BANJAR digunakan untuk mendistribusikan air kepada pelanggan di Kabupaten Banjar maupun suplai air ke PDAM Unit IKK yang lain dan akan direncanakan juga untuk pengembangan debit tambahan, dikarenakan debit pada PDAM INTAN BANJAR yang cukup besar.

4. Unit Pelayanan

Dilihat dari cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar dalam tahun 2021 (data terakhir hingga bulan Maret 2021) baru mencapai 37,62 % dari jumlah penduduk untuk wilayah pelayanan IKK, dengan jumlah sambungan aktif 56.667 sambungan. Berikut cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar IKK Tahun 2021:

Tabel 3.29 Cakupan Pelayanan PDAM Intan Banjar IKK Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah Sambungan (buah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
1.	Cab. I Landasan Ulin – Gambut	23.125	124.397	69,45
2.	Cab. II Kertak Hanyar	12.130	46.635	99,84
3.	Cab. II Sungai Tabuk	5.527	65.398	36,25
4.	Cab. II Tambak Sirang	10.055	59.749	66,44
5.	Cab. III Astambul	1.345	37.421	15,24
6.	Cab. III Mataraman	1.699	26.805	25,92
7.	Cab. III Simpang Empat	1.058	27.973	18,59
8.	Cab. III Pengaron	909	18.242	21,50
9	Cab. III Sungai Pinang	445	17.470	11,41
10	Cab. III Sambung Makmur	374	13.792	11,57
Jumlah		56.667	437.882	37,62

Sumber: RISPAM, 2021

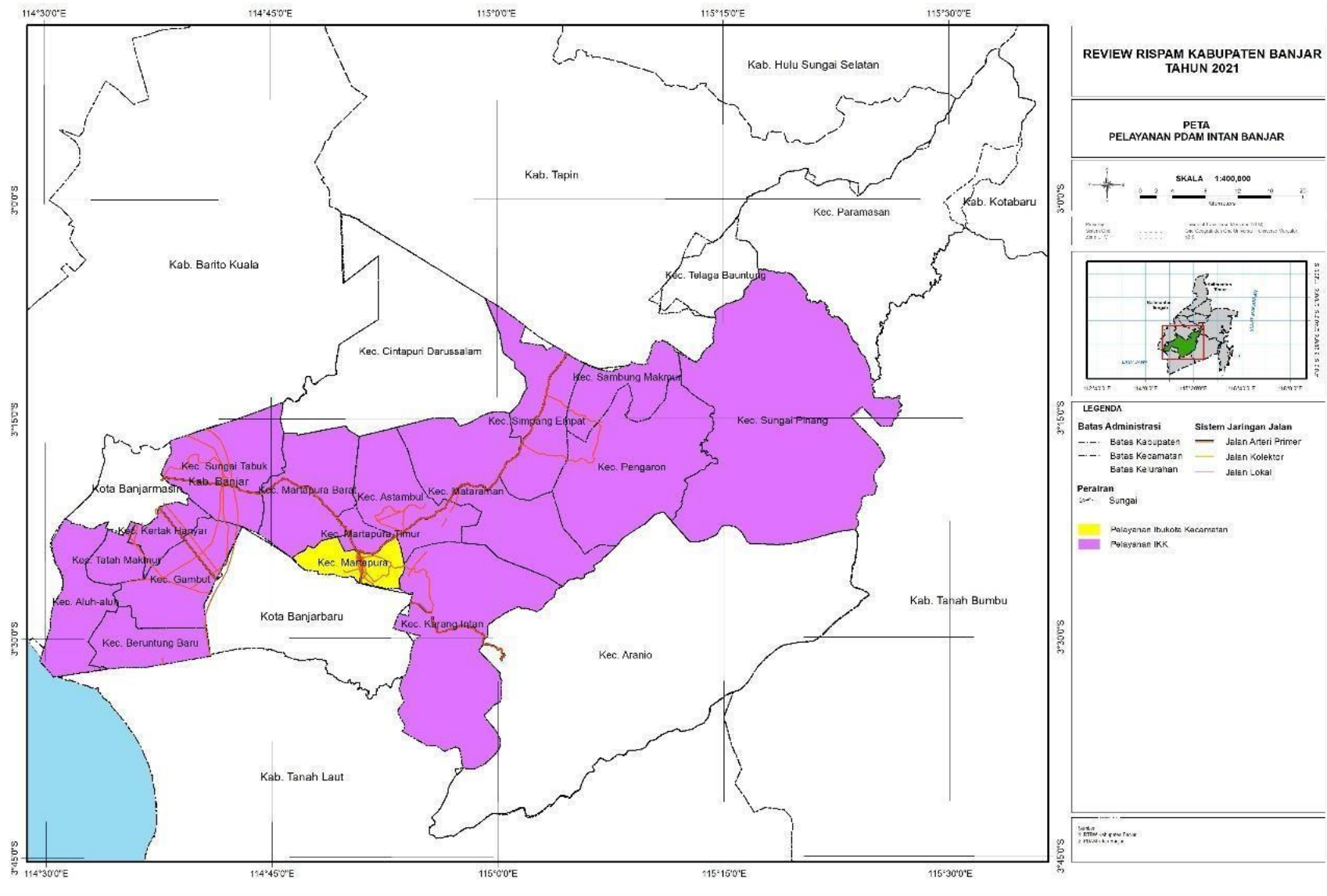
Tingkat distribusi air di Ibukota Kecamatan Banjar tahun 2021 dari bulan Januari-Juni mencapai 1.605.358 m³, dan air curah dari Banjar Bakula dan IPA Syarkawi mencapai 8.592.285 m³ dan hingga bulan Juni tahun 2021 tingkat pemakaian air berdasarkan jumlah air yang terjual adalah sebesar 5.415.797 m³.

Berdasarkan besaran tingkat air yang terjual dapat diketahui pemakaian rata- rata air di wilayah pelayanan unit SPAM Ibukota Kecamatan Banjar ini adalah sebesar = $5.415.797 \text{ m}^3/56.667 \text{ SR}/12$ bulan = $7,96 \text{ m}^3/\text{SR}/\text{bln}$ = $66,325 \text{ liter/org/hari}$. Data lengkap rincian distribusi air dan kehilangan air dapat dilihat pada tabel 3.30 dibawah ini.

Tabel 3.30 Distribusi Air dan Kehilangan Air PDAM Intan Banjar Tahun 2021

Bulan	Distribusi				Air Curah Banjarbakula	Air Curah IPA Syarkawi	Distr + Air Curah	Air Terjual	Kehilangan Air Volume (m ³)	%
	BNA (IPA Pinus)	CAB I (Sumur)	CAB II (IPA Manarap)	CAB III						
Januari	327.296	46.013	142.122	79.143	592.924	880.579	2.068.077	1.277.836	790.241	38,21
Februari	311.361	43.953	144.806	62.580	537.572	781.552	1.881.824	1.166.550	715.274	38,01
Maret	251.604	29.318	141.822	68.239	589.576	923.300	2.003.859	1.105.732	898.127	44,82
April	281.611	43.695	146.507	75.309	579.341	888.079	2.014.542	1.243.253	771.289	38,29
Mei	340.666	48.125	156.829	78.285	603.015	845.402	2.072.322	1.261.958	810.364	39,10
Juni	375.359	48.881	159.136	90.595	576.736	794.209	2.044.916	1.248.365	796.551	38,95
Jumlah	1.887.897	259.985	891.222	454.151	3.479.164	5.113.121	12.085.540	7.303.694	4.781.846	39,57

Sumber: RISPAM, 2021



Peta 3.6 Pelayanan Air Minum IKK PDAM Intan Banjar

2.2.1.3 SPAM Perdesaan

SPAM perdesaan tidak ada yang dikelola oleh PDAM baik dalam sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Spam perdesaan lebih banyak dikelola oleh PAMSIMAS ataupun swadaya masyarakat pribadi.

2.2.2 SPAM Lembaga Pengelolaan Non PDAM

2.2.2.1 SPAM Ibukota Kabupaten

1. Jaringan Perpipaan (JP)

SPAM Ibukota Kabupaten Banjar yang berada di Kecamatan Martapura dengan sistem jaringan perpipaan selain dilayani oleh PDAM Intan Banjar juga dilayani oleh PAMSIMAS dan UPT SPAM Banjarbakula. Pelayanan air minum oleh PAMSIMAS berada hampir di seluruh kecamatan termasuk di Kecamatan Martapura yang merupakan Ibukota Kabupaten Banjar. Adapun cakupan pelayanan air minum PAMSIMAS di Kecamatan Martapura dapat dilihat pada tabel 3.31 dibawah ini.

Tabel 3.31 Cakupan Pelayanan PAMSIMAS Ibukota Kabupaten Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Martapura	Tambak Baru	232	675	81	231
2	Martapura	Tambak Baru Ilir	228	646	130	410
3	Martapura	Tambak Baru Ulu	383	1047	157	444
Jumlah Total			843	2.365	368	1.085

Sumber : RISPAM, 2021

Pelayanan UPT SPAM Banjarbakula yang berada di wilayah Kecamatan Martapura ini sama dengan wilayah pelayanan PDAM Intan Banjar karena berdasarkan dokumen RISPAM Banjarbakula *output* dari pelayanan UPT SPAM Banjarbakula berupa air curah dengan kapasitas 500 l/s untuk seluruh Kabupaten Banjar, yang nantinya akan dikelola oleh PDAM Kab/Kota yang bersangkutan dalam hal ini di Kabupaten Banjar adalah PDAM Intan Banjar.

2. Bukan Jaringan Perpipaan (JP)

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Ibukota Kabupaten Banjar yang berada di Kecamatan Martapura dikelola oleh pribadi masyarakat atau rumah tangga. Adapun pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan Kecamatan Martapura dapat dilihat pada tabel 3.32 dibawah ini.

Tabel 3.32 Pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan Kecamatan Martapura Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN																							
				SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR				MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN			
				JUMLA H SARAN A	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLA H SARAN A	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA	MEMENUHI SYARAT		JUML AH SARA NA	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA	MEMENUHI SYARAT		JU ML AH SA RA NA	JUMLAH PEND UDUK PENG GUNA	MEMENUHI SYARAT		JU ML AH SA RA NA	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA	MEMENUHI SYARAT		JUML AH SARA NA	JUMLAH PEND UDUK PENG GUN A	MEMENUHI SYARAT	
						JUMLA H SARAN A	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA			JUMLA H SARAN A	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA			JUML AH SARA NA	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA			JU ML AH SA RA NA	JUMLAH PEND UDUK PENG GUNA			JU ML AH SA RA NA	JUMLA H PEND UDUK PENG GUNA			JUML AH SARA NA	JUMLA H PEND UDUK PENG GUN A
9	Martapura	Martapura I	83.657	14.231	68.402	14.131	68.402	14.131	64.502	14.131	68.402	557	2.696	557	2.660												
10		Martapura 2	34.241	2.770	13.650	2.770	13.650					1.892	9.860	1.892	9.860	106	2.650	106	2.650	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: RISPAM 2021

2.2.2.2 SPAM IKK(Ibukota Kecamatan)

1. Jaringan Perpipaan (JP)

SPAM Ibukota Kecamatan (IKK) Kabupaten Banjar dengan sistem jaringan perpipaan juga dilayani oleh PAMSIMAS dan UPT SPAM Banjarbakula. Pelayanan oleh PAMSIMAS juga berada di desa-desa setiap kecamatan di Kabupaten Banjar. Adapun cakupan pelayanan air minum PAMSIMAS di IKK dapat dilihat pada tabel 3.33 dibawah ini.

Tabel 3.33 Cakupan Pelayanan PAMSIMAS IKK Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Aranio	Aranio	362	1230	90	306
2	Cintapuri Darussalam	Karya Makmur	107	352	28	93
3	Simpang Empat	Lok Cantung	192	565	118	472
4	Telaga Bauntung	LokTanah	336	1101	65	226
5	Sambung Makmur	Madurejo	780	2930	5	19
6	Paramasan	Paramasan Bawah	445	1739	138	541
7	Pengaron	Pengaron	986	2636	0	0
8	Simpang Empat	Simpang Empat	1198	3859	50	200
9	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	288	833	160	483
Jumlah Total			4694	15245	654	2340

Sumber : RISPAM, 2021

Pelayanan UPT SPAM Banjarbakula yang berada di IKK meliputi Kecamatan Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan dan Tatah Makmur ini sama dengan wilayah pelayanan IKK PDAM Intan Banjar karena berdasarkan dokumen RISPAM Banjarbakula output dari pelayanan UPT SPAM Banjarbakula berupa air curah dengan kapasitas 500 l/suntuk seluruh Kabupaten Banjar, yang nantinya akan dikelola oleh PDAM Kab/Kota yang bersangkutan dalam hal ini di Kabupaten Banjar adalah PDAMIntan Banjar.

2. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Ibukota Kecamatan Banjar yang berada di 18 kecamatan dikelola oleh pribadi masyarakat atau rumah tangga. Adapun pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan di IKK dapat dilihat pada tabel 3.34. dibawah ini.

Tabel 3.34 Pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Banjar Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN																							
				SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR				MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN			
				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT	
						JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA
1	Aluh-aluh	Aluh-Aluh	30.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	200	4	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Beruntung Baru	Beruntung Baru	14.742	27	496	27	496	32	926	32	926	12	400	12	400	-	-	-	-	-	-	-	-	998	4.210	998	4.210
3	Gambut	Gambut	41.398	584	2.920	292	1.460	877	4.385	681	3.405	396	1.915	316	1.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar	45.242	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60	6	60	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tatah Makmur	Tatah Makmur	12.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tabuk 1	Sungai Tabuk 1	31.468	1.274	3.975	1.002	4.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Sungai Tabuk 2	13.506	2	10	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		Sungai Tabuk 3	18.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	113	29	113	-	-	-	-

[illegible]

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN																							
				SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR				MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN			
				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT	
						JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA
20	Sambung Makmur	Sambung Makmur	13.315	113	1.530	113	1.530	480	10.483	261	5.973	-	-	-	-	12	201	12	288	28	720	28	690	30	220	30	220
21	Mataraman	Mataraman	26.282	1.704	8.380	1.696	8.355	-	-	-	-	189	1.047	183	1.047												
22	Simpang Empat	Simpang Empat 1	18.587	578	3.783	167	840	1.052	6.132	532	3.446	41	667	39	646	5.193	5.193	-	-	-	-	-	-	155	584	96	416
23		Simpang Empat 2	18.982	961	7.000	981	7.000	816	1.985	79	1.985	1.049	1.940	443	1.049	31	1.193	218	1.193	31	1.000	68	1.000	31	703	18	570
24		Telaga Bauntung	Telaga Bauntung	3.538	-	-	-	-	214	1.826	97	912	1	10	1	10	1	38	9	739	9	739	-	-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)			580.026	26.512	138.368	25.009	131.077	20.477	106.574	17.684	96.108	4.976	23.643	3.908	21.619	5.374	13.142	360	5.752	132	11.803	154	9.514	1.214	5.717	1.142	5.416

Sumber: RISPAM 2021

2.2.2.3 SPAM Perdesaan

1. Jaringan Perpipaan (JP)

SPAM Perdesaan Kabupaten Banjar dengan sistem jaringan perpipaan hanya dilayani oleh PAMSIMAS. Pelayanan oleh PAMSIMAS menjadi pelayanan utama terutama untuk masyarakat perdesaan. Adapun cakupan pelayanan air minum PAMSIMAS di perdesaan dapat dilihat pada tabel 3.35 dibawah ini.

Tabel 3.35 Cakupan Pelayanan PAMSIMAS Perdesaan Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Karang Intan	Abirau	476	1517	182	558
2	Cintapuri Darussalam	Alalak Padang	417	1424	22	88
3	Pengaron	Alimukim	197	613	135	420
4	Paramasan	Angkipih	335	1051	98	307
5	Pengaron	Antaraku	306	951	15	136
6	Martapura Barat	Antasan Sutun	149	465	149	465
7	Aranio	Apuai	148	481	148	481
8	Aranio	Aranio	362	1230	90	306
9	Aranio	Artain	160	567	160	567
10	Astambul	Astambul Seberang	262	932	32	112
11	Pengaron	Ati'im	301	954	35	140
12	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	919	2972	144	466
13	Karang Intan	Awang Bangkal Timur	386	1149	182	409
14	Beruntung Baru	Babirik	297	1032	50	174
15	Karang Intan	Balau	370	1159	90	290
16	Sambung Makmur	Baliangin	286	1729	146	886
17	Astambul	Banua Anyar	459	1443	114	389
18	Astambul	Banua Anyar ST	374	1137	97	294
19	Mataraman	Baru	743	2287	261	919
20	Sambung Makmur	Batang Banyu	450	1697	82	334
21	Simpang Empat	Batu Balian	1222	4422	172	689
22	Sambung Makmur	Batu Tanam	420	1469	6	32
23	Mataraman	Bawahan Pasar	878	3080	42	136
24	Mataraman	Bawahan Sebrang	174	465	86	258
25	Mataraman	Bawahan Selan	1244	3731	166	593
26	Aranio	Belangian	99	343	99	343
27	Sungai Pinang	Belimbing Baru	346	1299	96	360
28	Sungai Pinang	Belimbing Lama	294	1014	218	757
29	Pengaron	Benteng	591	1883	221	630
30	Cintapuri	Benua Anyar	182	602	40	85
31	Aranio	BENUA RIAM	234	783	234	783
32	Simpang Empat	Berkat Mulia	326	1145	248	893
33	Karang Intan	Biuh	596	1838	194	598
34	Aranio	Bunglai	321	1252	177	707
35	Cintapuri Darussalam	Cinta Puri	760	2557	10	38
36	Cintapuri Darussalam	Garis Hanyar	279	1033	120	480

No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
37	Sungai Tabukl	Gudang Hirang	1602	4782	75	300
38	Mataraman	Gunung Ulin	394	1211	149	596
39	Sungai Pinang	Hakim Makmur	355	1731	355	1731
40	Beruntung Baru	Handil Purai	314	1052	104	373
41	Astambul	JATI	533	1600	1	3
42	Sungai Pinang	Kahelaan	822	2645	807	2594
43	Aranio	Kala'an	220	667	220	667
44	Astambul	Kalampayan	436	1425	5	17
45	Astambul	Kalampayan Ulu	350	1143	221	645
46	Cintapuri Darussalam	Karya Makmur	107	352	28	93
47	Astambul	Kelampaian Ilir	558	1838	436	1579
48	Sungai Tabuk	Keliling Benteng Ilir	358	1331	90	334
49	Martapura Barat	Keliling Benteng Tengah	391	1151	150	438
50	Martapura Barat	Keliling Benteng Ulu	679	2082	239	742
51	Martapura Timur	Keramat Baru	293	1009	110	478
52	Simpang Empat	Keramat Mina	501	1656	35	105
53	Pengaron	Kertak Empat	207	629	37	103
54	Karang Intan	Kiram	269	929	0	0
55	Sungai Pinang	Kupang Rejo	382	1298	70	238
56	Simpang Empat	Lawiran	264	802	75	200
57	Astambul	Limamar	579	1818	319	998
58	Pengaron	Lobang Baru	340	982	100	352
59	Sungai Tabuk	Lok Baintan	657	1766	70	282
60	Sungai Tabuk	Lok Baintan Dalam	558	1924	134	562
61	Sungai Tabuk	Lok Buntar	696	2439	75	227
62	Simpang Empat	Lok Cantung	192	565	118	472
63	Mataraman	Lok Tamu	510	1680	80	240
64	Karang Intan	Lok Tangga	330	1001	152	472
65	Astambul	Lokgabang	510	1640	374	1094
66	Telaga Bauntung	LokTanah	336	1101	65	226
67	Pengaron	Loktunggul	445	1326	167	514
68	Pengaron	Lumpangi	125	416	30	96
69	Sambung Makmur	Madurejo	780	2930	5	19
70	Simpang Empat	Makmur Karya	378	1034	20	80
71	Karang Intan	Mandi Kapau Barat	534	1679	449	1506
72	Karang Intan	Mandi Kapau Timur	401	1268	401	1268
73	Karang Intan	Mandiingin Barat	735	2753	508	1854
74	Karang Intan	Mandiingin Timur	444	1320	260	911
75	Mataraman	Mangkalawat	126	504	126	504
76	Pengaron	Mangkauk	1316	4317	310	839
77	Pengaron	Maniapun	471	1276	8	30
78	Martapura Timur	Melayu Ulu	619	2389	173	689
79	Beruntung Baru	Muara Halayung	318	1283	65	192
80	Astambul	Munggu Raya	180	550	180	550
81	Aranio	Pa'Au	337	1131	179	600
82	Karang Intan	Padang Panjang	265	936	128	516
83	Simpang Empat	Paku	550	1799	72	246
84	Sungai Tabuk	Paku Alam	228	791	41	142
85	Sungai Pinang	Pakutik	401	1151	136	255
86	Karang Intan	Panyambaran	362	1233	100	329

No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
87	Pengaron	Panyuruan	238	843	54	199
88	Paramasan	Paramasan Atas	728	2156	147	435
89	Paramasan	Paramasan Bawah	445	1739	138	541
90	Sambung Makmur	Pasar Baru	580	1382	2	6
91	Simpang Empat	Pasar Lama	225	726	70	280
92	Mataraman	Pasiraman	172	540	172	540
93	Sungai Tabuk	Pejambuan	433	1372	110	439
94	Martapura Timur	Pekauman Ulu	568	2177	180	698
95	S.Tabuk	Pemakuan	541	2171	140	651
96	Martapura Timur	Pematang Baru	332	1027	98	298
97	Mataraman	Pematang Danau	730	2871	139	553
98	Sungai Tabuk	Pembantanan	907	3417	10	40
99	Pengaron	Pengaron	986	2636	0	0
100	Martapura Barat	Penggalaman	614	2161	45	167
101	Beruntung Baru	Pindahan baru	345	1228	21	76
102	Astambul	Pingaran Ulu	675	2117	0	0
103	Karang Intan	Pulau Nyiur	499	1666	357	1166
104	Telaga Bauntung	Rampah	87	270	87	270
105	Aranio	Rantau Balai	213	643	213	643
106	Aranio	Rantau Bujur	250	797	250	797
107	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	387	1241	162	517
108	Paramasan	Remo	183	603	183	603
109	Beruntung Baru	Salat Makmur	148	519	49	186
110	Mataraman	Sei Jati	556	1665	100	337
111	Simpang Empat	Sei Langsung	169	714	79	316
112	Martapura Barat	Sei. Rangas Hambuku	500	1950	0	0
113	Simpang Empat	Simpang Empat	1198	3859	50	200
114	Cintapuri	Simpang Lima	134	445	0	0
115	Mataraman	Simpang Tiga	873	2490	41	83
116	Cintapuri Darussalam	Sindang Jaya	105	336	0	0
117	Sungai Pinang	Sumber Baru	484	1937	85	381
118	Sungai Pinang	Sumber Harapan	164	518	68	224
119	Karang Intan	Sungai Alang	561	1755	245	858
120	Karang Intan	Sungai Asam	416	1458	194	688
121	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	1189	4024	35	140
122	Sungai Tabuk	Sungai Bangkal	404	1340	12	37
123	Martapura Barat	Sungai Batang	557	1778	485	1445
124	Martapura Barat	Sungai Batang Ilir	558	1800	97	418
125	Karang Intan	Sungai Besar	226	731	58	245
126	Martapura Timur	Sungai Kitano	331	1111	170	613
127	Karang Intan	Sungai Landas	336	1118	253	826
128	Sambung Makmur	Sungai Lurus	363	1540	115	460
129	Sungai Tabuk	Sungai Pinang Baru	616	2058	82	259
130	Sungai Tabuk	Sungai Pinang Lama	667	2187	0	0
131	Martapura Barat	Sungai Rangas	227	630	6	16
132	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	288	833	160	483
133	Martapura Barat	Sungai Rangas Ulu	600	1766	151	530
134	Simpang Empat	Sungai Tabuk	162	501	162	501
135	Sungai Tabuk	Sungai Tandipah	883	2633	86	250
136	Simpang Empat	Sungkai	618	1947	91	286

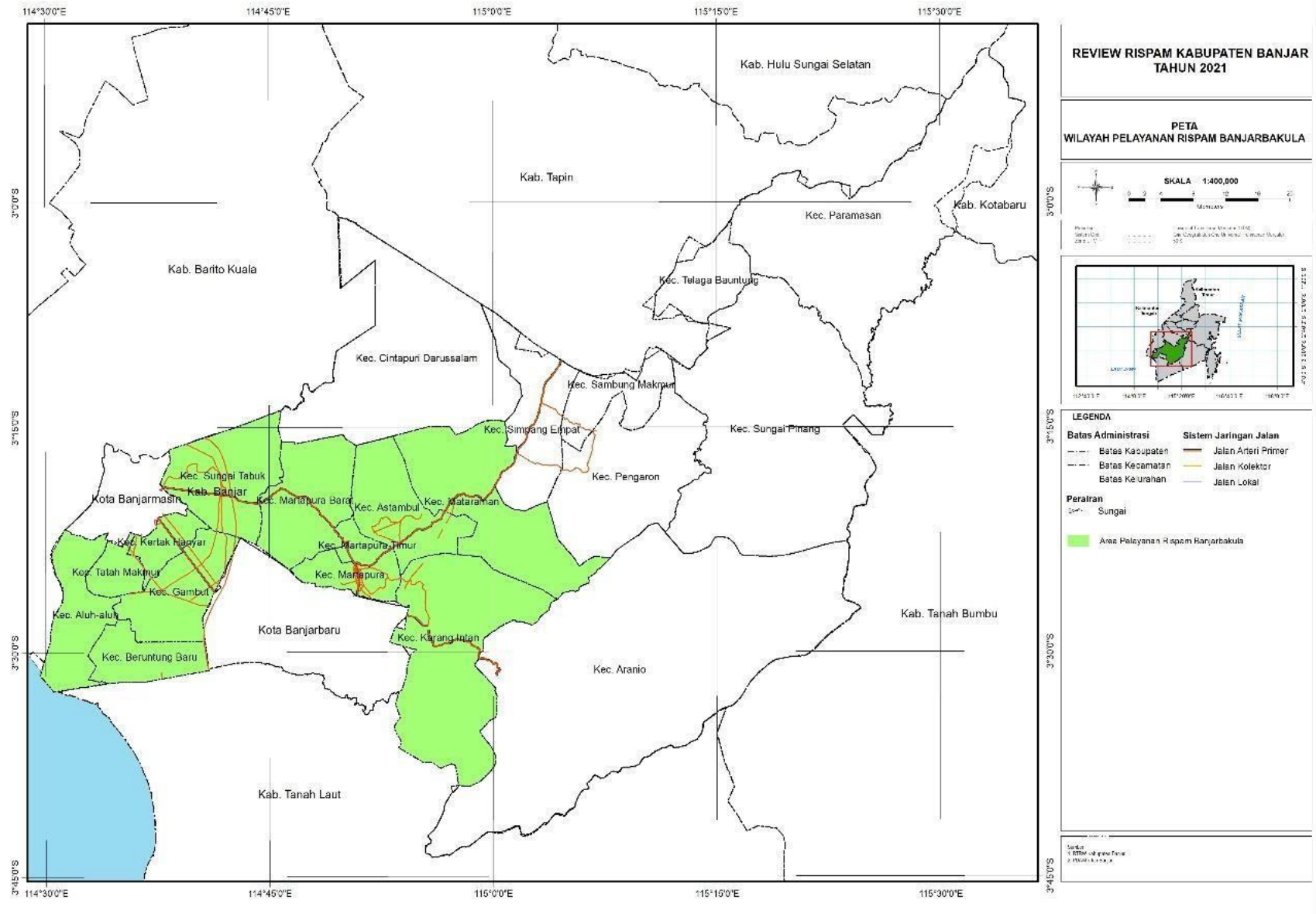
No	Kecamatan	Desa	Total Penduduk		Akses Pamsimas	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
137	Simpang Empat	Sungkai Baru	729	1964	102	408
138	Mataraman	Surian	206	619	0	0
139	Cintapuri Darussalam	Surian	697	2033	0	0
140	Sungai Tabuk	Tajau Landung	421	1581	130	497
141	Mataraman	Takuti	536	1679	400	1317
142	Martapura	Tambak Baru	232	675	81	231
143	Martapura	Tambak Baru Ilir	228	646	130	410
144	Martapura	Tambak Baru Ulu	383	1047	157	444
145	Beruntung Baru	Tambak Padi	215	890	78	322
146	Mataraman	Tanah Abang	320	1175	90	327
147	Simpang Empat	Tanah Intan	426	1530	35	131
148	Telaga Bauntung	Telaga Baru	207	711	192	688
149	Aranio	Tiwingan Baru	196	628	196	628
150	Aranio	Tiwingan Lama	459	1449	105	327
Jumlah Total			66.847	220.094	19.561	66.855

Sumber : RISPAM, 2021

2. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

SPAM Perdesaan dengan sistem bukan jaringan perpipaan (BJP) ini ditunjukkan dengan masih adanya pemakaian air melalui sarana air bersih dari pribadi sendiri atau masyarakat. Adapun data-data pengguna sarana air bersih sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya karena data-data pengguna sarana air bersih sudah tercantum pada pelaporan tiap puskesmas pada tabel 3.35 diatas.

Peta 3.7 Pelayanan Air Minum PAMSIMAS Kabupaten Banjar



Peta 3.8 Pelayanan Air Minum SPAM Banjarbakula

2.2.3 Aspek Keuangan

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Kinerja PDAMIntan Banjar untuk tahun 2020 mendapatkan nilai 61,61 tergolong “baik” sedangkan berdasarkan penilain kinerja dari BPPSPAM, Kinerja PDAM Intan Banjar untuk tahun 2020 mendapatkan nilai 3,280 tergolong “sehat”.

Tabel 3.36 Penilaian Kinerja Berdasarkan Audit BPKP (Permendagri No. 47)

ASPEK	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NILAI	64,46	63,84	62,13	64,27	64,81	61,61
KINERJA	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber: RISPAM, 2021

Tabel 3.37 Penilaian Kinerja Berdasarkan BPPSPAM

ASPEK	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NILAI	3,460	3,485	3,505	3,440	3,180	3,280
KATEGORI	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT

Sumber: RISPAM, 2021

Sejak diterbitkannya nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru mengenai sistem pelayanan air bersih untuk ke 2 wilayah tersebut maka telah disepakati aspek penyertaan modal yang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Aspek Penyertaan Modal Antara Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Provinsi Kalimantan Selatan

Penyerta Modal	Uang Tunai	Aset	Total	Kepemilikan (%)
Pemkab Banjar	109 M	43 M	152 M	45%
Pemko Banjarbaru	83 M	60 M	143 M	43%
Prov Kalsel	41 M	-	41 M	12%
TOTAL	233 M	103 M	336 M	100%

Sumber: RUPM PDAM Intan Banjar, 2020

Tabel 3.39 Tingkat Progres Perusahaan PDAM Intan Banjar

Tahun	Laba (Milyar)	Aset (Milyar)	Cash Flow (Milyar)	Efektifitas Penagihan (%)
2016	7 M	333 M	53 M	94,94 %
2017	3 M	353 M	83 M	95,12 %
2018	4 M	394 M	81 M	94,95 %
2019	4 M	438 M	111 M	95,11 %
2020	2 M	464 M	102 M	96,96 %

Sumber: RISPAM, 2021

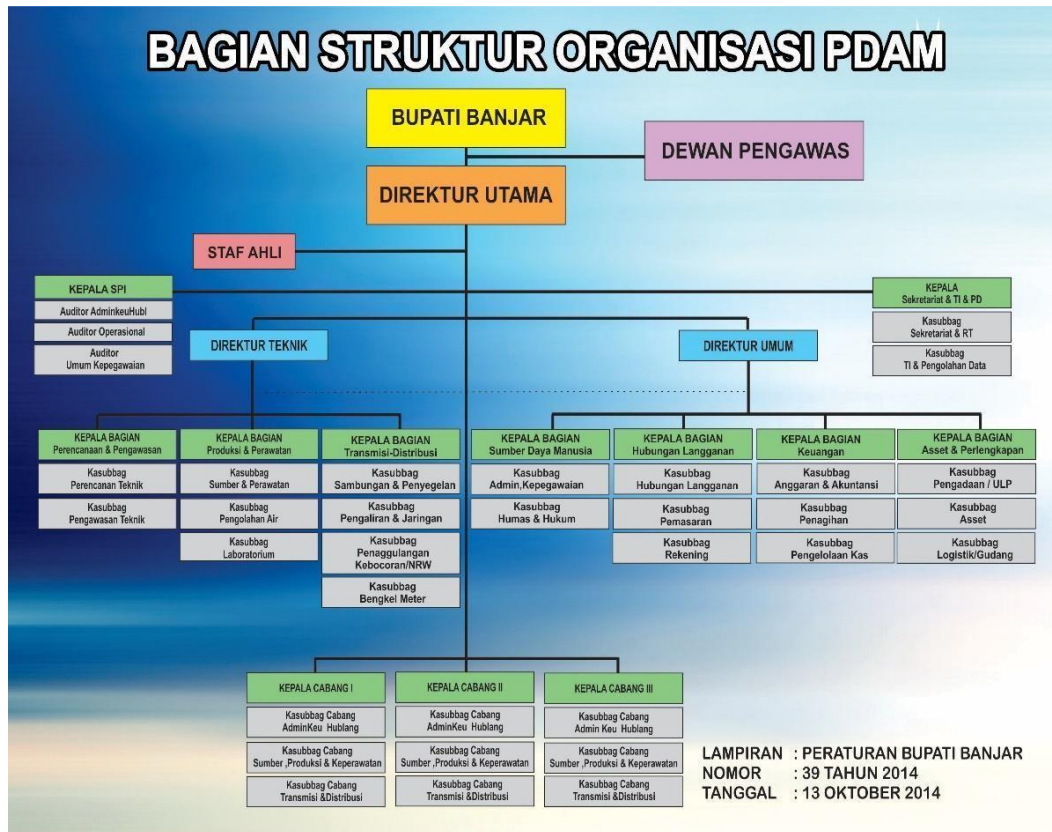
Selama tahun 2020 perusahaan mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 2.322.077.049,00 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 4.409.660.934,00. Penurunan laba disebabkan peningkatan beban operasional yaitu beban pembelian air curah/ air baku sebagai akibat penyesuaian tarif air curah oleh PT. Drupadi Tirta Intan per Maret 2020. Selain itu peningkatan beban pegawai yaitu iuran pensiun akibat penyesuaian PhDP, penyesuaian PhDP terakhir tahun 2016. Selain itu kondisi perekonomian menurun akibat pandemi *Covid-19* sehingga menurunkan daya beli masyarakat, termasuk pemakaian air oleh pelanggan.

2.2.4 Aspek Institusional dan Manajemen

Struktur organisasi PTAM Intan Banjar saat ini sehari-hari berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan dibina oleh Badan Pengawas yang terdiri atas unsur profesional sebagai ketua didukung oleh unsur pelanggan sebagai sekretaris dan unsur pemegang saham sebagai anggota.

Secara struktural, organisasi PTAM terdiri atas dua bidang yakni bidang teknis, dipimpin oleh seorang direktur teknik dan bidang administrasi dan keuangan dipimpin oleh seorang direktur umum. Secara keseluruhan, tanggungjawab pelaksanaan tugas PTAM ini berada pada direktur utama, didukung oleh kedua direktur bidang. Selain dibantu oleh 2 orang direktur, direktur utama juga dibantu oleh staf ahli yang bertanggungjawab langsung kepada direktur utama.

Struktur organisasi dan tata kerja PTAM Intan Banjar telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PTAM Intan Banjar, sebagaimana tergambar dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 3.30 Struktur Organisasi PDAM Intan Banjar

Perkembangan jumlah karyawan apabila dibandingkan dengan jumlah pelanggan selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.40 Perbandingan Jumlah Pelanggan dengan Jumlah Karyawan

Keterangan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pelanggan	36.608	41.925	46.964	54.923
Jumlah Karyawan	121	120	130	129
Rata-rata Karyawan per 1000 pelanggan	3,3	2,86	2,7	2,3

Sumber: RISPAM 2021

Berdasarkan penilaian kinerja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan Tingkat Kesehatan PDAM menurut BPPSPAM, bahwa rasio karyawan terhadap pelanggan adalah 8:1000 dimana 8 karyawan melayani 1000 pelanggan telah terpenuhi pada tahun 2014, rata-rata karyawan per 1000 pelanggan sebesar 2,3.

Komposisi karyawan PTAM Intan Banjar berdasarkan status Pegawai pada tahun 2014 sebanyak 129 orang.

Tabel 3.41 Komposisi Kepegawaian Karyawan PDAM Intan Banjar

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)			
	2011	2012	2013	2014
S. 2 (Strata 2)	3	3	6	7
S. 1 (Strata 1)	31	34	48	51
D. III (Diploma III)	25	26	31	30
SLTA / SMK, dan sederajat	55	51	39	39
SLTP / sederajat	2	2	5	1
SD (Sekolah Dasar)	2	2	1	1
JUMLAH	121	120	130	129

Sumber: RISPAM 2021

Dari tabel diatas dapat terlihat komposisi dari pegawai PDAM Intan Banjar Tahun 2014 yaitu pegawai yang berpendidikan Strata 1 mendominasi dengan jumlah 51 orang atau sebesar 39,5%. Walaupun PDAM memiliki karyawan dengan berbagai latar belakang pendidikan yang cukup, namun upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja terus dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.

Seiring dengan adanya pemekaran wilayah menjadi 2 wilayah kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, maka agar lebih efisien dan efektif pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat di kedua wilayah ini tetap dilakukan oleh PDAM Intan Banjar melalui peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru secara harmonis, berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan “Nota Kesepahaman” Dengan kewenangan:

1. Kedua belah pihak berwenang untuk mengetahui permasalahan pengelolaan pelayanan air bersih;
2. Kedua belah pihak berwenang mempertanyakan penyelesaian masalah yang ditangani oleh PTAM Kabupaten Banjar;
3. Kedua belah pihak dapat membantu PTAM dalam menyelesaikan masalah dan bantuan, terutama masalah yang berkaitan dengan investasi, penggantian pipa, pengembangan pipa-pipa yang berdiameter besar, penambahan kapasitas pengolahan air, perijinan, pembebasan tanah dan lain-lain;
4. Kedua belah pihak dapat memberikan fasilitas kepada PDAM, yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, Hukum dan kases kepada instansi pemerintah lainnya baik di daerah kabupaten atau kota, propinsi dan pemerintah pusat.

2.2.5 Aspek Pengaturan

Perusahaan daerah Air Minum PTAM Intan Banjar merupakan perusahaan milik daerah (BUMD) Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang didirikan atas dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 553/KPTS/1988 Tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Banjar
4. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 014/KPTS/CK/1982 tanggal 8 Februari 1982 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Banjar
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda)

7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 03 tanggal 31 Januari 2005 tentang Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjar
8. Peraturan Bupati Banjar nomor 4 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjar tanggal 31 Januari 2005;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banjar tanggal 22 januari 2010.

3.3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

3.3.1 Isu Strategis

Isu strategis dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu Kabupaten Banjar masuk dalam Kawasan strategis Banjarbakula; masih terdapat *idle capacity* yang belum termanfaatkan; Peningkatan pelayanan air minum, upaya pemenuhan kebutuhan air baku, Penyelenggaraan dan penerapan peraturan perundang undangan serta penegakan hukum, Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; Peningkatan kapasitas kelembagaan; dan Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi dan teknologi.

Isu Strategis terkait SPAM Regional Banjarbakula ialah; Dana untuk pengembangan pelaksanaan SPAM regional sangat besar, sedangkan kemampuan daerah terbatas;

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah.
- b) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal.
- c) Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.

- d) Saat ini PDAM belum memberikan kontribusi/setoran untuk APBD, karena cakupan pelayanan diatas 80% baru akan memberikan setoran PAD.

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) belum adanya regulator (Instansi/ SKPD) yang menangani pengelola air minum;
- b) belum optimalnya peran BPSPAM dan Asosiasi SPAM Perdesaan; dan
- c) penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah.

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturanperundang-undangan, antara lain:

- a) belum memadainya perangkat Peraturan Perundangan (Perda/Perbup) yang diperlukan dalam mengatur penyelenggaraan SPAM, terutama pengaturan dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat;
- b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk diterapkan; dan
- c) pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan sudah ada.

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) banyaknya DAS sebagai sumber air baku yang kondisinya semakin memburuk sehingga tidak bisa menyimpan air dengan baik. Selain itu, kondisi sumber air terutama permukaan sungai cenderung semakin tercemar oleh limbah akibat pertambangan yang tidak terkendali, limbah rumah tangga, limbah akibat usaha tambak ikan, penyebaran Ecoli karena aktivitas buang air besar (BAB) sembarangan;
- b) Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan /

penyimpanan air;

- c) Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai;
- d) Kapasitas daya dukung air baku diberbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik; dan
- e) Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi-lokasi yang jauh terjangkau jaringan perpipaan PDAM khususnya wilayah perdesaan disebabkan faktor menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum.

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM;
- b) Belum adanya keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- c) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- d) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;
- e) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain :

- a) Inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pengolahan air masih belum optimal. Di Kecamatan Telaga Bauntung dan Cintapuri Darussalam tidak ada sumber air dan kondisi air asam, sehingga memerlukan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM nya karena masalah air baku atau teknis lainnya;

- b) Belum adanya Inovasi teknologi yang efisien untuk penurunan tingkat kehilangan air.
- c) Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi untuk 75 desa rawan air
- Daerah Dataran Tinggi
Daerah Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Pengaron dan Mataraman memanfaatkan melalui jaringan perpipaan dengan sumber air baku berada di IPA Sambung Makmur dengan kapasitas 20 lt/det dan penampungan air hujan (PAH) yang dapat bertahan selama 3 bulan.
 - Daerah Dataran Rendah/Gambut
Daerah Cintapuri Darussalam memanfaatkan jaringan perpipaan PDAM dan teknologi pengolahan air gambut.
 - Daerah Pesisir
Daerah Beruntung Baru, Aluh-Aluh dan Sungai Tabuk dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air asin seperti RO (*Reverse Osmosis*).

3.3.2 Permasalahan

Kondisi eksisting sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Banjar masih sangat rendah hal ini ditunjukkan masih ada beberapa daerah yang rawan air seperti di Kecamatan Aluh Aluh. Data teknis cakupan pelayanan air minum Kabupaten Banjar dapat dilihat dari lembaga penyedia air minum yaitu PDAM Intan Banjar dan PAMSIMAS.

Penyediaan air minum penduduk Kabupaten Banjar saat ini dipenuhi dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM Intan Banjar dan Program PAMSIMAS milik pemerintah pusat. PDAM Intan Banjar secara resmi berubah penyebutannya menjadi PTAM INTAN BANJAR berdasarkan hasil kesepakatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar tanggal 8 Desember tahun 2021, hal ini merupakan bentuk tindak lanjut atas Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Cakupan pelayanan air minum PTAM Intan Banjar tergolong masih rendah, yaitu 50,63 % atau 59.573 sambungan rumah (data terakhir Oktober Tahun 2023) untuk wilayah Kabupaten Banjar, sedangkan pelayanan PAMSIMAS juga rendah yaitu 18,57% atau 21.852 sambungan rumah (data terakhir Desember Tahun 2022).

Masih banyak penduduk di Kabupaten Banjar terutama di wilayah studi yang mendapatkan air minum dari sungai, dan sumur gali sendiri. Pada musim kemarau yang panjang kondisi air baku berkurang, dimana debit air permukaan dan air tanah menurun. Hingga saat ini pelayanan air minum penduduk Kabupaten Banjar terutama di wilayah studi sebagian besar dilayani melalui IKK yang terdapat pada masing-masing kecamatan tersebut.

Kapasitas produksi PDAM Kabupaten Banjar sampai akhir tahun 2023 sebesar 957 L/detik dari kapasitas terpasang 1.122,5 L/detik (sudah termasuk IPA Banjarbakula) sehingga masih ada *idle capacity* 165,5 L/detik dengan efektivitas 85,26 %.

Adapun tingkat kehilangan air di Kabupaten Banjar berdasarkan data dari PDAM Intan Banjar pada tahun 2023 sampai dengan akhir bulan Desember yaitu sebesar 359,72% dan tingkat konsumsi air untuk Kabupaten Banjar di Kecamatan Martapura yang merupakan Ibukota Kabupaten adalah 97,42 liter/org/hari, sedangkan tingkat konsumsi air di masing-masing IKK Kabupaten Banjar adalah 66,325 liter/org/hari. Tingkat konsumsi air ini berdasarkan hitungan real pemakaian menggunakan data air yang terjual pada sistem distribusi jaringan pelanggan PDAM Intan Banjar.

3.3.3 Tantangan

Tantangan dari Penyelenggaraan SPAM PDAM Intan Banjar antara lain:

1. Kelebihan kapasitas (*over capacity*) IPA Manarap di cabang II terkait

suplai ke pelanggan karena kebutuhan pelanggan sebesar 120 l/s namun kapasitas yang ada hanya 85 l/s.

2. Kekurangan air baku di IPA Manarap sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, PDAM beli air curah sebesar 35 l/s.
3. Suplai ke pelanggan lama di Kecamatan aluh-aluh bermasalah karena air curah dari IPA Syarkawi tidak sampai ke booster tambak sirang akibat gangguan pembesasan lahan.
4. Suplai *existing* ke booster tambak sirang dari IPA Syarkawi masih menggunakan pipa distribusi yang dijadikan pipa tranmisi juga sehingga tekanannya sangat rendah.
5. Masih terdapat *idle capacity* dari IPA Syarkawi sebesar 100 l/s yang belum dimanfaatkan.
6. Kualitas air baku di cabang III menurun sehingga perlu alternatif teknologi dalam pengolahannya.
7. Tingkat kehilangan air yang masih tinggi dikarenakan beberapa jaringan pipa distribusi berada dibawah badan jalan, tanah rawa, pipa tua, water meter masih banyak diatas 5 (lima) tahun.

Tantangan dari Penyelenggaraan SPAM NonPDAM antara lain:

1. Cakupan pelayanan PAMSIMAS yang sangat rendah di Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Paramasan;
2. Terdapat tambahan kapasitas 500 l/s berupa air curah dari program RISPAM Banjarbakula yang belum termanfaatkan secara maksimal;
3. Masih tingginya prosentase angka kebocoran air minum (Lebih dari 20%);
4. Banyaknya penebangan pohon/alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya daerah serapan; dan
5. Kondisi air baku yang memenuhi 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) sulit di temukan terutama di kawasan Cintapuri.

Tantangan dari aspek non teknis yang masih dihadapi PDAM Intan Banjar dan PAMSIMAS hingga saat ini antara lain:

1. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;
2. Sistem informasi manajemen belum memadai;
3. Belum memiliki ukuran kepuasan karyawan;
4. Pelayanan pengaduan dan pelatihan belum memadai;
5. Masih banyak minat masyarakat yang kurang untuk berlangganan PDAM karena ada sumber air lain seperti sungai dan sumur;
6. Belum maksimalnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;
7. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi;
8. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
9. Terbatasnya SDM dalam upaya pengelolaan SPAM baik kuantitas maupun kualitas;
10. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
11. Belum optimalnya peran KPSAM dan Asosiasi SPAMS Perdesaan;
12. Masih rendahnya kesadaran sebagian aparat desa dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan;
13. Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup/perwali, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan;
14. Masih rendahnya kesadaran masyarakat;
15. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat;
16. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan;
17. Masih rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat; dan
18. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring evaluasi.



KONDISI CAPAIAN PELAYANAN SEKTOR AIR MINUM

4.1 AIR MINUM PERPIPAAN

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah / sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Air minum perpipaan disini di maksudkan juga sebagai Sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh PTAM Intan Banjar yang umumnya melayani kawasan perkotaan maupun IKK (Ibu Kota Kecamatan).

Metode perhitungan mengacu kepada PERMEN_PUPR NO 29 /2018-tentang Standar Teknis SPM PUPR dengan rumus dasar sebagai berikut:

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Masyarakat terlayani}}{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Proyeksi total masyarakat}}$$

Adapun data dasar yang menjadi variable yang akan di masukan dalam rumus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Jiwa terlayani SPAM PTAM Intan Banjar

No	Kecamatan	Jumlah SL	Jumlah Jiwa Terlayani
1	Aluh Aluh	1.030	5.150
2	Astambul	1.405	7.025
3	Beruntung Baru	610	3.050
4	Gambut	15.536	77.680
5	Karang Intan	318	1.590
6	Kertak Hanyar	17.020	85.100
7	Martapura Kota	8.530	42.650
8	Martapura Barat	95	475
9	Martapura timur	909	4.545
10	Mataraman	1.737	8.685
11	Pengaron	931	4.655
12	Sambung Makmur	232	1.160
13	Simpang Empat	1.104	5.520
14	Sungai Pinang	556	2.780
15	Sungai Tabuk	6.156	30.780
16	Tatah Makmur	2.634	13.170
Jumlah		58.803	294.015

Sumber: PTAM Intan Banjar 2023

Selain data tersebut di tahun 2023 ini juga terdapat pembangunan SPAM perpipaan yang pendanaan nya bersumber dari dana DAK tahun 2023, kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bidang Cipta Karya Kab. Banjar sebanyak 770 SR, oleh karenanya maka total sambungan rumah yang di capai di tahun 2023 ini ialah sebanyak 59.573 SR. Jika di asumsikan 1 SR itu terdiri dari 5 jiwa maka jumlah masyarakat yang terlayani pada tahun 2023 ini ialah sebanyak 297.865 Jiwa.

Berikut adalah hasil perhitungan capaian SPM air minum perpipaan di tahun 2023:

Tabel 4.2. Capaian SPM Air Minum Perpipaan 2023

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN		
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)
1	2	3	4=(5/6)*100
2023	297.865	588.277	50,63

Sumber: Hasil analisa konsultan, 2023

Keterangan

- KOLOM 1 : Tahun SPM Cakupan Pelayanan Air Minum
- KOLOM 2 : Jumlah Masyarakat terlayani dengan jaringan Perpipaan pada akhir Tahun Berjalan, bersumber dari PTAM Intan Banjar dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bidang Cipta Karya Kab. Banjar
- KOLOM 3 : Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2023 bersumber dari BPS (Proyeksi Penduduk tahun 2023)
- KOLOM 4 : SPM atau Standar Pelayanan Minimum yang merupakan angka capaian Cakupan Pelayan di bidang Air Minum Perpipaan

4.2 AIR MINUM NON PERPIPAAN

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Metode perhitungan mengacu kepada PERMEN_PUPR NO 29 /2018-tentang Standar Teknis SPM PUPR dengan rumus dasar sebagai berikut:

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Masyarakat terlayani}}{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Proyeksi total masyarakat}}$$

Adapun data dasar yang menjadi variable yang akan di masukan dalam rumus tersebut bersumber dari PAMSIMAS Kabupaten Banjar dengan jumlah SR sebanyak 11.656 (SR dengan meter) dan 4.328 (SR tanpa meter) dengan demikian total SR yang di dapat dari program PAMSIMAS sampai dengan akhir tahun 2022 adalah 15.984 SR.

Selain data tersebut sampai dengan tahun 2023 ini juga terdapat pembangunan SPAM perpipaan yang pendanaan nya bersumber dari dana DAK untuk dukungan PAMSIMAS, kegiatannya dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bidang Cipta Karya Kabupaten Banjar sebanyak 5.868 SR, Jika di asumsikan 1 (satu) SR itu terdiri dari 5 (lima) jiwa maka jumlah masyarakat yang terlayani SPAM non PTAM pada tahun 2023 ini ialah sebanyak 109.260 Jiwa.

Berikut adalah hasil perhitungan capaian SPM air minum non perpipaan di tahun 2023:

Tabel 4.3. Capaian SPM Air Minum Non Perpipaan

TAHUN	AIR MINUM NON PERPIPAAN		
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)
1	5	6	7=(5/6)*100
2023	109.260	588.277	18,57

Sumber: Hasil analisa konsultan, 2023

Keterangan

- KOLOM 1 : Tahun SPM Cakupan Pelayanan Air Minum
- KOLOM 5 : Jumlah Masyarakat terlayani dengan jaringan Non Perpipaan / non PTAM pada akhir Tahun pencapaian
- KOLOM 6 : Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2023 bersumber dari BPS (Proyeksi Penduduk tahun 2023)
- KOLOM 7 : SPM atau Standar Pelayanan Minimum yang merupakan angka capaian Cakupan Pelayanan di bidang Air Minum Non Perpipaan

4.3 CAPAIAN SPM SEKTOR AIR MINUM

Untuk capaian sektor air minum Kabupaten Banjar merupakan hasil penjumlahan dari capaian SPM perpipaan dan capaian SPM non perpipaan, sesuai dengan petunjuk perhitungan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Capaian SPM Sektor Air Minum Kabupaten Banjar Tahun 2023

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN			AIR MINUM NON PERPIPAAN			SPM CAKUPAN PELAYANA NAIR MINUM (%)
	Jumlah Masyarakat terlayani padaakhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	Jumlah Masyarakat terlayani padaakhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalana)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4=(5/6)*100	5	6	7=(5/6)*100	8=4+7
2023	297.865	588.277	50,63	109.260	588.277	18,57	69,21

Sumber: Hasil analisa konsultan, 2023

Keterangan

- KOLOM 1 : Tahun SPM Cakupan Pelayanan Air Minum
- KOLOM 2 : Jumlah Masyarakat terlayani dengan jaringan Perpipaan pada akhir Tahun Berjalan, bersumber dari PTAM Intan Banjar dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bidang Cipta Karya
- KOLOM 3 : Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2023 bersumber dari BPS (Proyeksi Penduduk tahun 2023)
- KOLOM 4 : SPM atau Standar Pelayanan Minimum yang merupakan angka capaian Cakupan Pelayan di bidang Air Minum Perpipaan
- KOLOM 5 : Jumlah Masyarakat terlayani dengan jaringan Non Perpipaan / non PTAM pada akhir Tahun pencapaian
- KOLOM 6 : Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2023 bersumber dari BPS (Proyeksi Penduduk tahun 2023)
- KOLOM 7 : SPM atau Standar Pelayanan Minimum yang merupakan angka capaian Cakupan Pelayan di bidang Air Minum Non Perpipaan / Non PTAM
- KOLOM 8 : SPM Cakupan Pelayan Air Minum Kabupaten

4.4 SKENARIO PENCAPAIAN

Dari data kondisi eksisting maupun hasil analisa sebelumnya dapat di lanjutkan untuk dilakukan simulasi perhitungan skenario pencapaian SPM tahunan dari target SPM yang di canangkan di tahun 2028.

Di awali dengan melakukan iputan data capaian SPM eksisting dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, data ini diperlukan sebagai

gambaran trend peningkatan SPM setiap tahun nya (tertinggi, terendah maupun rata - rata).

Tabel 4.5
Capaian SPM Sektor Air Minum Kabupaten Banjar tahun
2021 - 2023

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN			AIR MINUM NON PERPIPAAN			SPAM CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4=(5/6)*100	5	6	7=(5/6)*100	8=4+7
2021	221.005	572.109	38,63	78.580	572.109	13,74	52,37
2022	233.475	579.910	40,26	79.920	579.910	13,78	54,04
2023	297.865	588.277	50,63	109.260	588.277	18,57	69,21

Sumber: PTAM Intan Banjar, PUPR Kab. Banjar serta analisa konsultan

Tabel tersebut digunakan sebagai baseline perkembangan SPM Kabupaten Banjar, dimana kita bisa menghitung penambahan Jumlah Masyarakat terlayani daritahun ke tahun baik itu di lingkup air minum perpipaan maupun non perpipaan.

Untuk air minum perpipaan sendiri mengalami penambahan di tahun 2022 sebesar 12.470 jiwa dan di tahun 2023 bertambah lagi sebanyak 64.390 jiwa, sedangkan untuk air minum non perpipaan pada tahun 2022 hanya mengalami penambahan sebanyak 1.340 jiwa namun di tahun 2023 mengalami penambahan sebanyak 29.340 jiwa.

Dari gambaran di atas dapat di hitung penambahan rata – rata untuk masing lingkup, yaitu untuk air minum perpipaan rata – rata bertambah sebesar 38.430 jiwa sedangkan untuk air minum non perpipaan rata – rata sebanyak 15.340 jiwa.

Jika angka rata – rata tersebut di simulasi kan kedalam hitungan dengan skenario di tahun 2028 tercapai angka SPM sektor air minum Kab. Banjar sebesar 100% maka terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Simulasi Awal Target Capaian SPM Sektor Air Minum
Kabupaten Banjartahun 2023 - 2028

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN			AIR MINUM NON PERPIPAAN			SPAM CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4=(5/6)*100	5	6	7=(5/6)*100	8=4+7
2021	221.005	572.109	38,63	78.580	572.109	13,74	52,37
2022	233.475	579.910	40,26	79.920	579.910	13,78	54,04
2023	297.865	588.277	50,63	109.260	588.277	18,57	69,21
2024	336.295	596.797	56,35	124.600	596.797	20,88	77,23
2025	374.725	605.471	61,89	139.940	605.471	23,11	85,00
2026	413.155	614.303	67,26	155.280	614.303	25,28	92,53
2027	451.585	623.297	72,45	170.620	623.297	27,37	99,82
2028	490.015	632.455	77,48	185.960	632.455	29,40	106,88

Sumber: PTAM Intan Banjar, PUPR Kab. Banjar serta analisis konsultan

Dapat terlihat bahwa di tahun 2028 capaian SPM sudah melebihi dari target capaian yang diharapkan, untuk itu dapat dilakukan relaksasi / pengurangan target penambahan tahunan terutama di lingkup air minum non perpipaan (PAMSIMAS), atas dasar pertimbangan kemampuan, kesinambungan dan potensi sumber daya yang dimiliki maka angka yang dipakai sebagai target yang dianggap mampu dipenuhi adalah angka rata rata di lingkup air minum perpipaan yang umum nya di kelola oleh PTAM Intan Banjar dan DPUPRP Kabupaten Banjar, sehingga target PAMSIMAS dapat dilakukan pengurangan.

Langkah terakhir adalah dengan menetapkan target capaian SPM di akhirtahun 2028 sebanyak 100% maka di dapatkan pendekatan angka sebanyak 6.640 jiwa sebagai target penambahan tiap tahun nya pada SPM air minum non perpipaan (PAMSIMAS).

Tabel 4.7

Simulasi Akhir Target Capaian SPM Sektor Air Minum
Kabupaten Banjartahun 2023 - 2028

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN			AIR MINUM NON PERPIPAAN			SPAM CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun 2028 pencapaian SPM (BPS 2023)	SPM Cakupan Pelayanan	
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4=(5/6)*100	5	6	7=(5/6)*100	8=4+7
2021	221.005	572.109	38,63	78.580	572.109	13,74	52,37
2022	233.475	579.910	40,26	79.920	579.910	13,78	54,04
2023	297.865	588.277	50,63	109.260	588.277	18,57	69,21
2024	336.295	596.797	56,35	115.900	596.797	19,42	75,77
2025	374.725	605.471	61,89	122.540	605.471	20,24	82,13
2026	413.155	614.303	67,26	129.180	614.303	21,03	88,28
2027	451.585	623.297	72,45	135.820	623.297	21,79	94,24
2028	490.015	632.455	77,48	142.460	632.455	22,52	100,00

Sumber: PTAM Intan Banjar, PUPR Kab. Banjar serta analisis konsultan

Atas penjelasan tersebut dapat dilakukan estimasi perhitungan biaya terhadap kebutuhan peningkatan capaian target SPM Air Minum Perpipaian per tahun nya, seperti terlihat pada uraian di bawah ini.

Tabel 4.8. Estimasi Perhitungan Biaya Terhadap Kebutuhan Peningkatan Capaian Target SPM Air Minum Perpipaian Per Tahun

Aspek	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Proyeksi Penduduk	Jiwa	588.277	596.797	605.471	614.303	623.297	632.455
Proyeksi Penduduk Terlayani	%	50,63	56,35	61,89	67,26	72,45	77,48
	Jiwa	297.865	336.295	374.725	413.155	451.585	490.015
Backlog / deviasi Penduduk Belum Terlayani	Jiwa	290.412	260.502	230.746	201.148	171.712	142.440
	%	49,37	43,65	38,11	32,74	27,55	22,52
Target Peningkatan Layanan	%		5,72	5,54	5,37	5,20	5,03
	Jiwa		19.224	20.759	22.170	23.460	24.634
Jumlah SR yang harus di pasang			3.845	4.152	4.434	4.692	4.927
Biaya pemasangan SR dan Jaringan (Rp)			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Biaya Pembangunan (Rp)			24.991.689.053	26.986.977.784	28.821.208.207	30.498.476.175	32.024.403.777

Sumber: Analisis konsultan

Sedangkan untuk estimasi perhitungan biaya terhadap kebutuhan peningkatan capaian target SPM Air Minum Non Perpipaian per tahun nya, seperti terlihat pada uraian di bawah ini.

Tabel 4.9. Estimasi Perhitungan Biaya Terhadap Kebutuhan Peningkatan Capaian Target SPM Air Minum Non Perpipaan Per Tahun

Aspek	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Proyeksi Penduduk	Jiwa	588.277	596.797	605.471	614.303	623.297	632.455
Proyeksi Penduduk Terlayani	%	18,57	19,42	20,24	21,03	21,79	22,52
	Jiwa	109.260	115.900	122.540	129.180	135.820	142.460
Backlog / deviasi Penduduk Belum Terlayani	Jiwa	479.017	480.897	482.931	485.123	487.477	489.995
	%	81,43	80,58	79,76	78,97	78,21	77,48
Target Peningkatan Layanan	%		0,85	0,82	0,79	0,76	0,73
	Jiwa		982	1.003	1.020	1.035	1.046
Jumlah SR yang harus di pasang			196	201	204	207	209
Biaya pemasangan SR + Menara dan Jaringan (Rp)			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Biaya Pembangunan (Rp)			2.357.282.849	2.407.029.879	2.449.008.747	2.483.434.054	2.510.764.376

Sumber: Analisis konsultan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Kabupaten Banjar memiliki SPM Pelayanan air minum di tahun 2023 sebesar 69,21%.
2. Masih terdapat *backlog* atau deviasi sebanyak 30,80% untuk menuju capaian 100% akses air minum Kabupaten.
3. Jika dalam rencana aksi daerah peningkatan capaian cakupan layanan 100% di target kan dalam 5 tahunan (sampai tahun 2028), maka setiap tahun di asumsikan memerlukan kenaikan atau penambahan capaian SPM sebanyak 5 % sampai dengan 7%.
4. Adapun jumlah SR yang harus di capai setiap tahunnya di perkirakan antara 3.800 sampai dengan 4.900 SR untuk SPAM perpipaan (PTAM) dan antara 190 SR sampai dengan 200 SR untuk SPAM non perpipaan (non PTAM).
5. Diperlukan biaya sebanyak 24 Milyar Rupiah sampai 32 Milyar Rupiah pertahunnya untuk SPAM perpipaan (PTAM) dan sebanyak 2,3 Milyar Rupiah sampai dengan 2,5 Milyar Rupiah untuk SPAM non perpipaan (non PTAM).



5.1 SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM 2028), pencapaian target SDGS dalam mencapai universal akses di tahun 2030 yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan pada bab sebelumnya, maka untuk mencapai sasaran tersebut diatas, Skenario Teknis / Fisik adalah sebagai berikut:

Pelayanan oleh PDAM ditargetkan	77,48%
Pelayanan Non PDAM	22,52%
Total	100,00%

Periode perencanaan pada JAKSTRADA SPAM Kabupaten Banjar, sesuai dengan lingkupnya adalah selama masa 5 (lima) tahun atau sampai dengan tahun 2028. Sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, pentahapan peningkatan pelayanan akan dilakukan setiap tahun nya.

Rencana pengembangan SPAM Kabupaten Banjar dibagi sesuai pentahapan 5 (lima) tahunan SPAM Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan, dan SPAM

Perdesaan (yang meliputi rencana pengembangan unit air baku, unit produksi, distribusi dan pelayanan) kemudian dituangkan pada Peta administrasi.

- a) Rencana pengembangan SPAM Kabupaten Banjar memuat program pengembangan SPAM yang meliputi:
 - 1) program optimalisasi Unit SPAM eksisting, yang bisa berupa pemanfaatan *idle capacity* dan pengurangan tingkat kehilangan air,
 - 2) program ekspansi, yaitu berupa pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem) baik rencana daerah pelayanan yang telah ditentukan.
- b) Rencana pengembangan pada BJP eksisting diarahkan sebagai berikut:
 - BJP tidak terlindungi dikembangkan menjadi BJP terlindungi
 - BJP terlindungi diarahkan menjadi JP
- c) Rencana pengembangan harus dilakukan baik pada SPAM Ibukota Kabupaten, SPAM IKK, maupun SPAM Perdesaan.

Pentahapan rencana pengembangan SPAM dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar ini diselaraskan dengan tahapan program pembangunan yang telah ditentukan dalam prioritas pembangunan infrastruktur yang sebagaimana tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar. Pada dasarnya prioritas pengembangan SPAM di Kabupaten Banjar adalah di wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan yang cenderung tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduknya cukup tinggi.

Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan kapasitas produksi:

1. Untuk IPA di Kecamatan Martapura diperlukan pengembangan kapasitas produksi sebesar 377 ltr/dtk pada tahun 2030.
2. Untuk Reservoir di Kecamatan Martapura diperlukan pengembangan kapasitas sebesar 6.520 m³ pada tahun 2030.
3. Untuk IPA di IKK Prioritas (Aluh – Aluh dan Sungai Tabuk) diperlukan peningkatan kapasitas produksi sebesar 213 ltr/dtk pada tahun 2030.

4. Untuk Reservoir di IKK Prioritas (Aluh – Aluh dan Sungai Tabuk) diperlukan pengembangan kapasitas sebesar 3.674 m³ pada tahun 2030.

Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas produksi pada 2 kawasan di atas, dapat meningkatkan jumlah SR sebanyak 10.000 SR (di Kecamatan Martapura) dan sebanyak 6.031 SR (di Kecamatan Aluh Aluh dan Sungai Tabuk).

5.2 SASARAN KEBIJAKAN

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2024- 2029 kabupaten Banjar. Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan

1. Pengembangan SPAM untuk mendukung Kawasan Strategis Banjarbakula
2. Pemanfaatan potensi pengolahan air baku untuk mendukung pelayanan penyediaan air minum
3. Peningkatan pelayanan air minum layak dan aman
4. Pemaksimalan sumber air baku potensial
5. Penyelenggaraan dan penerapan peraturan daerah
6. Peningkatan minat masyarakat
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan

Adapun Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan berdasarkan kebijakan yang disesuaikan terhadap isu strategis, sebagai berikut:

Kebijakan 1

Pengembangan SPAM untuk mendukung Kawasan Strategis Banjarkabula

Strategi :

1. Pemenuhan kebutuhan air bersih dikawasan cepat tumbuh permukiman
2. Perluasan jaringan layanan perpipaan
3. Pengembangan sistem pelayanan secara maksimal
4. Pemanfaatan sistem informasi untuk pemantauan wilayah potensial pelayanan

Kebijakan 2

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum

Strategi :

1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai air permukaan (sungai, mata air).
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional
5. Identifikasi sumber-sumber air baku potensial untuk mendukung peningkatan pelayanan
6. Pembangunan dan pemaksimalan pengolahan air baku untuk jangkauan masyarakat sekitar potensi

Kebijakan 3

Peningkatan pelayanan air minum layak dan aman

Strategi :

1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah
2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan SPAM
6. Menurunkan tingkat kehilangan air dengan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan
7. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

Kebijakan 4

Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi

Strategi

1. Pemaksimalan pengembangan air baku dengan inovasi dan teknologi
2. Sistem informasi manajemen penyelenggaraan SPAM

Kebijakan 5

Penyelenggaraan dan penerapan peraturan daerah

Strategi

1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam pengembangan SPAM
2. Menyusun / Menerapkan NSPK yang telah tersedia

3. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Kebijakan 6

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi

1. Edukasi dan Sosialisasi pentingnya air minum yang layak dan aman
2. Penyediaan SPAM ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal
3. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan cakupan layanan air bersih

Kebijakan 7

Peningkatan kapasitas kelembagaan

Strategi

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
2. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan SPAM
3. Memperkuat peran dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengembangan SPAM
4. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk penyelenggara/operator SPAM
5. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

5.3 KOMITMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terus melakukan upaya dan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di sektor air minum. Salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mendukung strategi dan kebijakan ini berupa pemberian prioritas penganggaran / pendanaan untuk pengembangan SPAM kabupaten Banjar baik itu sistem perpipaan, maupun Non Perpipaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar maupun alternatif pembiayaan lain yang memungkinkan untuk bisa di akses sebagai kolaborasi bersama dalam rangka peningkatan cakupan layanan sektor air minum Kabupaten Banjar.

Adapun bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana SPAM kepada masyarakat, penyertaan modal kepada PDAM Intan Banjar, maupun hal – hal lain yang bersifat peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi yang semuanya bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG SPAM

6.1 ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PTAM Intan Banjar mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya:

1. *Trade Credit*

Dengan cara ini penyelenggara mendapatkan fasilitas/instalasi yang dibangun dan didanai oleh pihak ketiga/pihak swasta dan dianggap sebagai hutang penyelenggara. Kesepakatan dilakukan antara penyelenggara dengan pihak swasta (B to B). Selanjutnya pengembalian dilakukan dengan cara mencicil selama jangka waktu yang disepakati. Fasilitas yang dibangun dengan cara ini biasanya di wilayah dimana pelanggan memiliki kemampuan membayar yang tinggi (*captive market*) atau yang potensial.

2. Pinjaman Bank Dalam Negeri/Luar Negeri

Sumber pendanaan ini berasal dari bank dalam negeri maupun dari luar negeri/SLA (*sub loan agreement*). Pendanaan investasi (untuk penyelenggara PTAM) melalui pinjaman dari bank dalam negeri diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan kepada PTAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat memenuhi persyaratan kinerja "sehat" dari hasil audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*).

Pinjaman mengasumsikan bahwa kebutuhan investasi akan dibiayai oleh pinjaman bank hingga kondisi keuangan internal cukup untuk membiayai kebutuhan investasi tersebut. Pada simulasi pinjaman ini, pinjaman diambil untuk 5 (lima) tahun pertama, kemudian kebutuhan investasi selanjutnya dipenuhi oleh keuangan internal, dengan asumsi kinerja teknis dan keuangan dapat terpenuhi maka diharapkan kas hasil operasional mampu untuk menutup biaya-biaya tersebut. Persyaratan pinjaman tergantung dari:

- a. Tingkat suku bunga per tahun
- b. Jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang.

Untuk pinjaman dari luar negeri dapat dilakukan dengan mengusahaan pinjaman lunak dengan jangka waktu pengembalian minimal 15 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun dari lembaga keuangan internasional melalui pinjaman SLA atau Rekening Pembangunan Daerah (RPD)

3. Mengundang investor untuk melakukan investasi di bawah program kemitraan (KPS). Kerjasama dengan pihak swasta dapat dilakukan untuk membangun fasilitas SPAM untuk melayani wilayah yang belum dilayani oleh penyelenggara (*green field*) dengan memiliki pelanggan potensial.
4. Dana penerbitan obligasi daerah

Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten). Persyaratan penerbitan obligasi yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Perlu dilakukan pemeringkatan kemampuan penyelenggara oleh lembaga pemeringkat yang berwenang. Minimum peringkat untuk mendapatkan pendanaan melalui obligasi adalah BBB.
 - b) Tingkat bunga (kupon) per tahun (lebih tinggi dari tingkat bunga acuan)
 - c) Jatuh tempo pembayaran pokok (misal 8 – 10 tahun)
5. Hibah bantuan teknis bilateral atau multilateral melalui pemerintah pusat;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Untuk program PAMSIMAS sendiri potensi pendanaan dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa, pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR) serta program kementerian dan bina lingkungan (PKBL).

6.2 KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Table 6.1. Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
1	6	7	8
1	Pengembangan SPAM untuk mendukung Kawasan Strategis Banjarbakula	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan cepat tumbuh permukiman; 2. perluasan jaringan layanan perpipaan; 3. pengembangan sistem pelayanan secara	1. Pembangunan jaringan perpipaan baru dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
		maksimal; dan 4. pemanfaatan sistem informasi untuk pemantauan wilayah potensial pelayanan.	Wilayah (RTRW), RISPAM dan <i>Business Plan</i> PTAM Intan Banjar; 2. optimalisasi SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 20 kecamatan dan desa; 3. rehabilitasi jaringan pipa yang tidak layak pakai seperti <i>Asbes Cement Pipe</i> (ACP) dengan <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); 4. menyediakan sumber energi cadangan / alternatif untuk mengoptimalkan aliran distribusi air pada saat listrik PLN mati; 5. membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor; dan 6. menetapkan institusi/lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM.
2	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum	1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku; 2. meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum 3. meningkatkan	1. Mengidentifikasi sumber air baku potensial; 2. meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan melaksanakan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
		efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai air permukaan (sungai, mata air); 4. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional; 5. identifikasi sumber-sumber air baku potensial untuk mendukung peningkatan pelayanan; dan 6. pembangunan dan pemaksimalan pengolahan air baku untuk jangkauan masyarakat sekitar potensi.	rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran; 3. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (pembatasan peningkatan jumlah sumur bor; dan 4. pendataan sumber air baku potensial dengan sistem informasi geografis.
3	Peningkatan pelayanan air minum layak dan aman	1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2. mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan	1. Melakukan pendataan akurat untuk jumlah pelanggan dan calon pelanggan potensial dengan sistem informasi yang terpadu; 2. pembangunan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada desa rawan air; 3. pembangunan sarana prasarana pendukung SPAM; dan 4. membuat pemetaan calon lokasi potensial pelayanan dengan sumber air baku yang tersedia.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
		berkelanjutan; 4. meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku; 5. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan SPAM; 6. menurunkan tingkat kehilangan air dengan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan; dan 7. mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.	
4	Penyelenggaraa n SPAM melalui penerapan inovasi teknologi	1. Memaksimalkan pengembangan air baku dengan inovasi dan teknologi; dan 2. sistem informasi manajemen penyelenggaraan SPAM.	1. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM; 2. mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum; 3. menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada Daerah dengan keterbatasan kuantitas baku; 4. menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM; dan 5. membuat kajian mengenai inovasi dan teknologi SPAM berdasarkan kearifan lokal.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
5	Pengembangan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum	1. Melengkapi produk peraturan perundang-undangan dalam pengembangan SPAM; 2. menyusun/ menerapkan NSPK yang telah tersedia; dan 3. menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.	1. Menyusun / menerapkan NSPK yang telah tersedia; dan 2. memfasilitasi penyusunan produk hukum mengenai pengaturan air minum di daerah
6	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat	1. Edukasi dan sosialisasi pentingnya air minum yang layak dan aman; 2. penyediaan SPAM ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal; dan 3. peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan cakupan layanan air bersih.	1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan serta sosialisasi tentang pentingnya menghemat air karena air bersih; 2. melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; 3. melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air; 4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air; dan 5. pembuatan wadah aspirasi masyarakat berupa aplikasi digital.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM; 2. memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan SPAM; 3. memperkuat peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengembangan SPAM; 4. Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara / operator SPAM; dan 5. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM.	1. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPAM; 2. meningkatkan kualitas BPSPAM yang terdapat di desa-desa; 3. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan; 4. memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM; 5. menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien; dan 6. meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola sertifikasi.



Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah daerah tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSDP-SPAM Kabupaten Banjar akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

KSDP-SPAM Kabupaten Banjar ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

Tabel 7.1. Matriks Indikator, Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM

No.	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	INTERNAL	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			EKSTERNAL				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan SPAM untuk mendukung Kawasan Strategis Banjarbakula	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih dikawasan cepat tumbuh permukiman (Pemenuhan kebutuhan air baku untuk minum) 2. Kelebihan kapasitas (<i>over capacity</i>)	Pemenuhan kebutuhan air bersih dikawasan cepat tumbuh permukiman	1. Pemaksimalan pembangunan infrastruktur air bersih untuk memenuhi perkembangan permukiman 2. Pemaksimalan pendanaan dalam pembangunan	Pengembangan SPAM untuk mendukung Kawasan Strategis Banjarbakula	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan cepat tumbuh permukiman 2. Perluasan jaringan layanan perpipaan 3. Pengembangan sistem pelayanan secara maksimal 4. Pemanfaatan sistem informasi untuk memonitoring wilayah potensial pelayanan	1. Pembangunan jaringan perpipaan baru dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 2. Rehabilitasi jaringan pipa yang tidak layak pakai seperti <i>Asbes Cement Pipe</i> (ACP) dengan <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE). 3. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.
2	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum	1. Kondisi Geografis (Beberapa masyarakat yang jauh dari pusat kegiatan) 2. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal 3. Minimnya teknologi dalam pengembangan SPAM 4. Pendistribusian	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan cepat tumbuh permukiman 2. Meningkatkan minat untuk berlangganan air PTAM	1. Pemaksimalan pembangunan infrastruktur air bersih untuk memenuhi perkembangan permukiman 2. Pemaksimalan pendanaan dalam	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum	1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. 2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai air permukaan (sungai, mata air). 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	1. Mengidentifikasi sumber air baku potensial 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran 3. Melakukan sosialisasi penghematan air masyarakat 4. Pendataan sumber air baku potensial dengan sistem informasi geografis

No.	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			EKSTERNAL	INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		masih terhambat dengan kondisi infrastruktur yang terbatas 5. Pengelolaan manajemen kewilayahan 6. Hambatan pembebasan lahan untuk Pengembangan infrastruktur pendukung layanan air bersih		pembangunan		5. Identifikasi sumber-sumber air baku potesial untuk mendukung peningkatan pelayanan 6. Pembangunan dan pemaksimalan pengolahan air baku untuk jangkauan masyarakat sekitar potensi	
3	Peningkatan pelayanan air minum layak dan aman	1. Air Baku (Sumber Air baku, Kualitas dan kuantitas Air baku) 2. Distribusi jaringan perpipaan dan non perpipaan masih belum maksimal 3. tekanan air masih kurang dikawasan pedesaan yang jauh dari sumber air baku 4. Kualitas air baku menurun dikawasan	1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman 2. Penekanan kehilangan air	1. Peningkatan kualitas air baku 2. Pemaksimalan sarana prasana distribusi jaringan	Peningkatan pelayanan air minum layak dan aman	1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah 2. Mengembangkan SPAM dalam Rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1. Optimalisasi pendataan untuk jumlah pelanggan dan calon pelanggan potensial dengan sistem informasi yang terpadu 2. Pembangunan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada desa rawan air 3. Pembangunan sarana prasara pendukung SPAM 4. Membuat pemetaan calon lokasi potensial pelayanan dengan sumber air baku yang tersedia

No.	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			EKSTERNAL	INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		pedesaan 5. Akses air pada sebagian wilayah hanya bisa digunakan pada jam tertentu saja 6. Tingkat kehilangan air yang masih tinggi				5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan SPAM 6. Menurunkan tingkat kehilangan air dengan evaluasi dan monitoring berkelanjutan 7. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi Kinerja pelayanan air minum	
4	Tersedianya dan terlaksananya teknologi dan inovasi pengembangan SPAM	1. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum Berkembang 2. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan. 3. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Penerapan teknologi dan inovasi sesuai dengan kearifan lokal 2. Megalihkan kebiasaan penerapan sistem lama dengan penggunaan teknologi dan inovasi terbaru	1. Penerapan teknologi dan inovasi sesuai dapat diterapkan dan implemtasikan 2. Inovasi dan teknologi dapat efektif dan efisien	Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi	1. Pemaksimalan pengembangan air baku dengan inovasi dan teknologi 2. Sistem informasi manajemen penyelenggaraan SPAM	1. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM 2. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum 3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kuantitas baku 4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM 5. Membuat kajian mengenai inovasi dan teknologi SPAM berdasarkan kearifan lokal

No.	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			EKSTERNAL	INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang					
5	Menjalankan dan menerapkan peraturan, perundang-undangan dan penegakan hukum	- Keberlanjutan (kualitas pengelolaan SPAM, dukungan anggaran, Pembinaan penyelenggara SPAM) - Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PTAM dan non perpipaan yang telah dilayani belum ada - Air minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum emenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi	Bentuk perundangan yang dibuat dapat dipahami oleh masyarakat	Pembuatan peraturan perundangan yang dapat diterima dan implementasikan masyarakat	Pengembangan dan penerapan perundang-undangan dan penegakan hukum	- Melengkapi produk peraturan perundangan dalam pengembangan SPAM - Menerapkan NSPK yang telah tersedia - Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	- Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 38/2007) - Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah.
6	Peningkatan perandan	1. Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan	1. Meningkatkan	Peningkatan peran dan	1. Edukasi dan Sosialisasi pentingnya air minum yang	1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup

No.	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			EKSTERNAL	INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
	kemitraan badan usaha dan masyarakat	(kondisi ekonomi dan pemahaman masyarakat tentang air bersih) 2. Minat masyarakat yang kurang untuk berlanggan air PTAM karena ada sumber air lain seperti sungai dan sumur. 3. Masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan Perencanaan pengembangan SPAM 4. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah	kesadaran, kepedulian dan peran masyarakat / swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan sumber daya air 2. Mengubah perilaku masyarakat akan gerakan hemat air 3. Meningkatkan peran swasta agar tertarik untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM	keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat / swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air 2. Meningkatkan pembinaan dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM	kemitraan badan usaha dan masyarakat	layak dan aman 2. Penyediaan SPAM ramah lingkungan dan berbasis kearifan local 3. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan cakupan layanan air bersih	bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan serta sosialisasi tentang pentingnya menghemat air karena air bersih 2. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 3. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air. 5. Pembuatan wadah aspirasi masyarakat berupa aplikasi digital
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Kesiapan Kelembagaan (Sistem Informasi manajemen, SDM, manajemen,	Rendahnya pembentukan lembaga swadaya masyarakat	1. Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM. 2. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan	1. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan SPAM 2. Meningkatkan kualitas BPSPAM yang terdapat di

